

RENSTRA

Rencana Strategis

TAHUN 2025 - 2029



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KOTA BOGOR

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
3.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Renstra Perangkat Daerah	71
3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	81
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	82
4.1 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	82
4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100
4.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Indikator Kinerja Kunci	125
BAB V PENUTUP	127

DAFTAR GAMBAR/ TABEL

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disparbud Kota Bogor	11
Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	16
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Menurut Golongan	17
Tabel 2.4 Kebutuhan Sumber Daya ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	18
Tabel 2.5 Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	19
Tabel 2.6 Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ...	21
Tabel 2.7 Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	23
Tabel 2.8 Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	26
Tabel 2.9 Sistem Informasi yang Digunakan untuk Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	28
Tabel 2.10 Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2020- 2021	30
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2022- 2024	31
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.13 Target dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.14 Fator Pendorong, Faktor Penghambat, Permasalahan dan Tindaklanjut	44
Tabel 2.15 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 2.16 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Layanan	52
Tabel 2.17 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah ..	55
Tabel 2.18 Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	59
Tabel 2.19 Tabel Permasalahan Perangkat Daerah	62
Tabel 2.20 Tabel Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	74
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah	77
Tabel 3.3 Pentahapan Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah	81
Tabel 4.1 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	83
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	101
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	117
Tabel 4.4 Rencana Prioritas Pembangunan Daerah	120
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita	123
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	125
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	126



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);



4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.



11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

Pasal 3

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:



- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;



- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.



BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Desember 2025

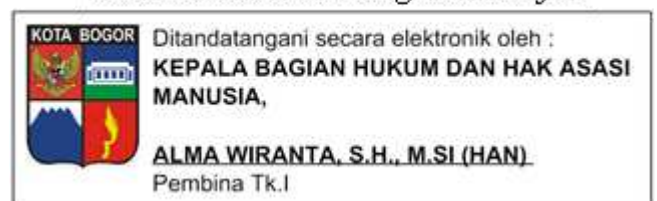
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya



RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

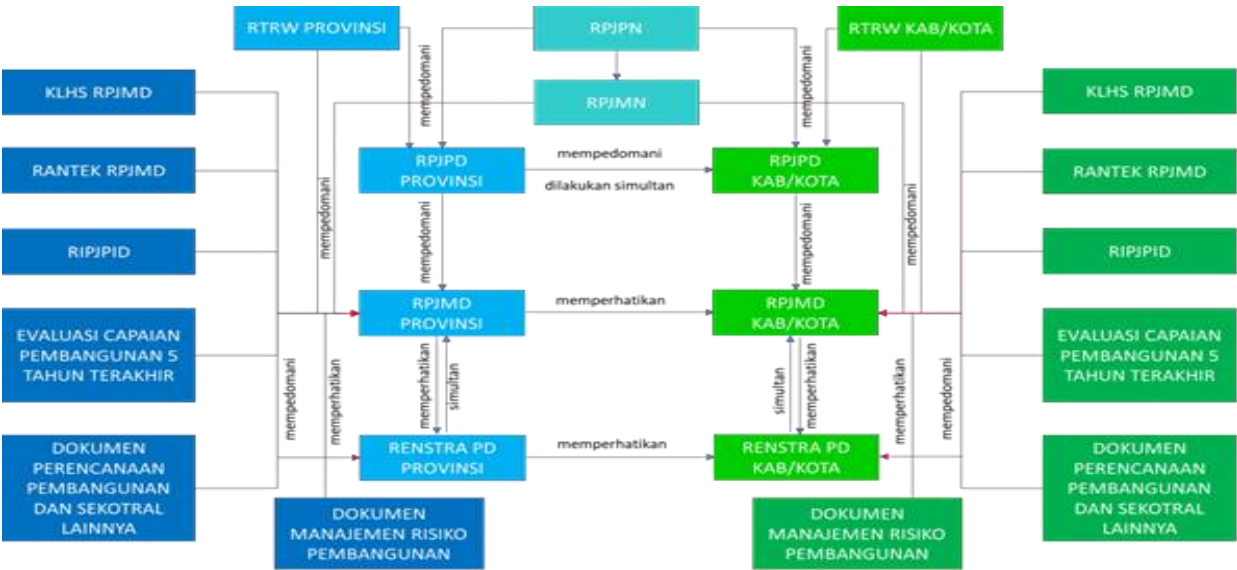
Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 agar kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahunan dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
- c. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Disparbud, 2025

RPJMD Kota Bogor yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor, yang memuat Visi: Bogor Beres, Bogor Maju, dengan Misi: Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. RPJMD Kota Bogor ini merupakan periode 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yang mempunyai Visi: Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan mempedomani:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- f. Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2029 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya, cakupan layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Renstra Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor memegang urusan pariwisata dan kebudayaan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah

Pusat dan Daerah;

- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 10) Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

- 18) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- 21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);
- 24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
- 25) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 14 Seri E);
- 26) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
- 27) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
- 28) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);
- 29) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;
- 30) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
- 31) Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21);
- 32) Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 132) sebagaimana diubah pada Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 63).

1.3. **MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA**

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kota Bogor 2025-2029, terutama yang terkait dengan urusan Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah:

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029;
- 2) Memberikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2029);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2025-2029 disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

Memuat sekurang – kurangnya hal – hal berikut :

- a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
- b. Sumber daya PD;
- c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
- d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD [jikalau ada];
- g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
- b. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra PD

- a. Menguraikan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD terkait dengan cakupan layanan perangkat daerah dan keterkaitan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah
- c. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.

- d. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*
 - f. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD.
- 3.2. Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- Menguraikan pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Menguraikan penjenjangan Kinerja PD merupakan cascading dari tujuan dan sasaran perangkat daerah sampai dengan sub kegiatan terkait beserta indikator kinerjanya.
- 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penganggaran Perangkat daerah
- Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya.
- 4.3. Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci/ Daerah Perangkat Daerah
- Menguraikan target IKU, IKK, SPM serta Prioritas Pembangunan Daerah terkait dengan layanan Perangkat Daerah
- 4.4. Rencana Pemenuhan SPM (Hanya Untuk PD Yang Mengampu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Gambaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Pembentukan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2023 Nomor 65);
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

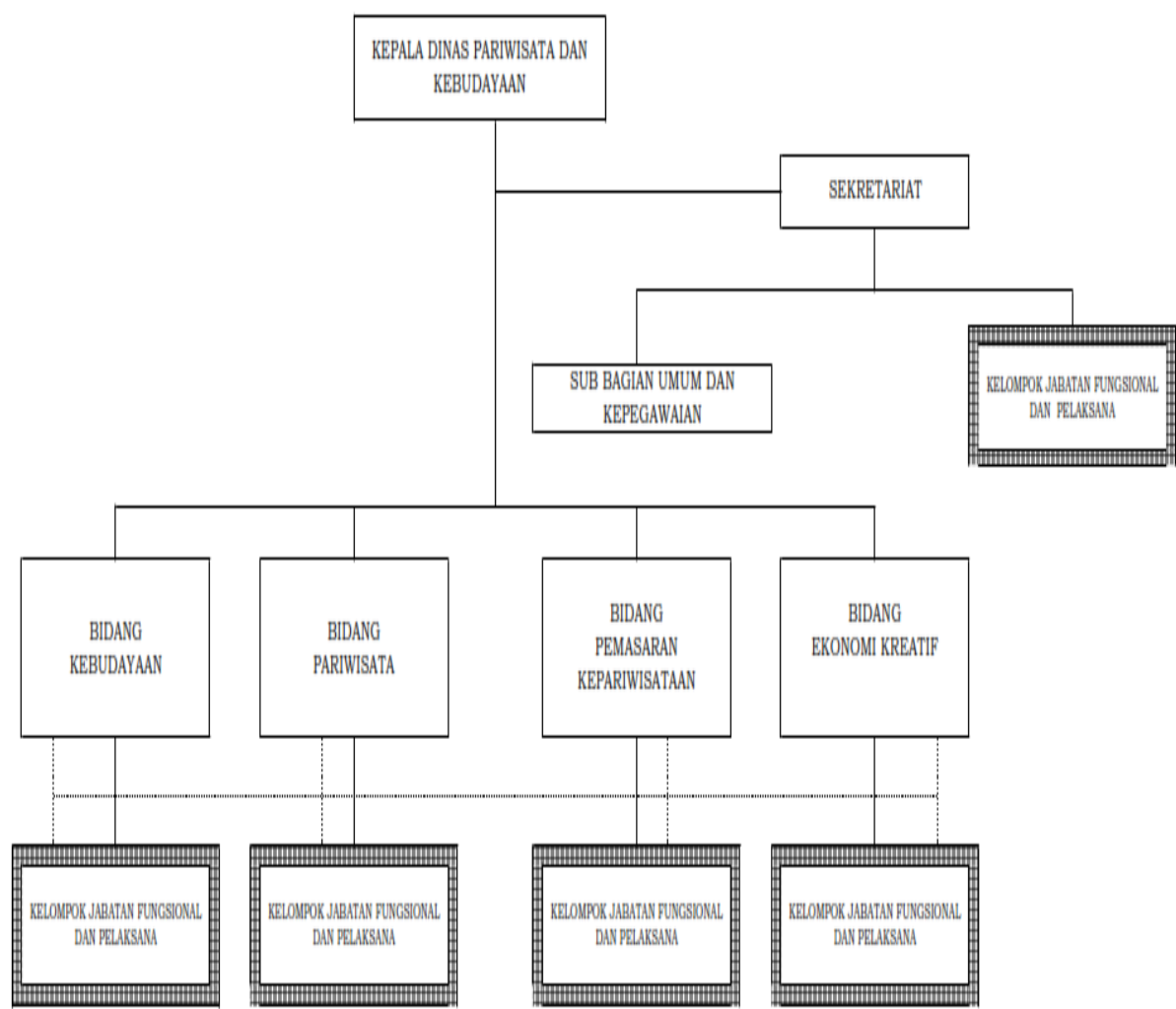
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 132 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- 3. Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 4. Bidang Pariwisata membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 5. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana: dan
- 6. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana:

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Bagan berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disparbud Kota Bogor



Sumber: Perwali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas:

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan kebudayaan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

2. Sekretariat:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

3. **Kepala Bidang Kebudayaan:**

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang kebudayaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4. **Kepala Bidang Pariwisata:**

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata:

Bidang Pemasaran Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemasaran Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pemasaran kepariwisataan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Ekonomi Kreatif:

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi sekretariat pada urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Suba Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

8. Kelompok Jabatan Fungsional:

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.1.2. **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas dan di dukung dengan sarana dan prasarana yang ber kondisi baik.

Sumber Daya Manusia

Jika dikelompokkan menurut jenjang pendidikan, komposisi pegawai (ASN/ Non ASN) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 3 orang (8,33%), pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 3 orang (8,33%), pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 19 orang (52,78%) dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak 11 orang (30,56%).

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Doktor (Strata 3)	-	
2	Pasca Sarjana (Strata 2)	11	30,56 %
3	Sarjana (Strata 1)	19	52,78 %
4	D3	3	8,33 %
5	SLTA	3	8,33 %
Jumlah		36	100

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Jika dikelompokkan menurut jenjang kelamin, komposisi pegawai (ASN/ Non ASN) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari 20 orang (55,56%) pegawai laki-laki dan 16 orang (44,44%) pegawai perempuan.

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – laki	20	55,56 %
2	Perempuan	16	44,44 %
Jumlah		36	100 %

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Sedangkan jika dikelompokkan menurut golongan, komposisi pegawai (ASN/ Non ASN) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang (22,22%), Golongan III sebanyak 24 orang (66,67%), Golongan II sebanyak 1 orang (2,78%), Golongan IX sebanyak 3 orang (8,33%).

Tabel 2.3.
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenjang Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan I	-	
2	Golongan II	1	PNS
3	Golongan III	24	PNS
4	Golongan IV	8	PNS
5	Golongan IX	3	PPPK
Jumlah		36	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Pada Tahun 2025 Semester I, jumlah pegawai ASN Disparbud Kota Bogor sesuai data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Bogor (SIMPEG) sebanyak 36 orang, dengan Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kebutuhan Sumber Daya ASN
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	JABATAN	Kondisi SDM sampai Semester I 2025 (orang)			Kebutuhan SDM (orang)	Selisih Kebutuhan SDM (orang)
		PNS	PPPK	Total ASN	ASN	ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
2	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
3	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
4	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
5	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
6	Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	0	1	1	0
8	Arsiparis Penyelia	0	0	0	1	-1
9	Arsiparis Mahir	0	0	0	1	-1
10	Arsiparis Terampil	0	0	0	1	-1
11	Perencana Ahli Madya	0	0	0	1	-1
12	Perencana Ahli Muda	1	0	1	1	0
13	Perencana Ahli Pertama	0	0	0	1	-1
14	Pranata Komputer Terampil	1	0	1	1	0
15	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	0	0	0	2	-2
16	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	8	0	8	9	-1
17	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	0	0	0	6	-6
18	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	0	0	1	-1
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	0	1	1	0
20	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	0	1	-1
21	Pamong Budaya Ahli Madya	0	0	0	1	-1
22	Pamong Budaya Ahli Muda	0	0	0	3	-3
23	Pamong Budaya Ahli Pertama	0	1	1	5	-4
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	0	1	1	0
25	Penelaah Teknis Kebijakan	9	0	9	16	-7
26	Kurator Koleksi Musium	0	0	0	2	-2
27	Penata Layanan Operasional	0	1	1	1	0
28	Pengolah Data dan Informasi	2	0	2	12	-10
29	Operator Layanan Operasional	0	0	0	2	-2
30	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	3	3	0
Jumlah		33	2	35	80	-45

Sumber : SIMPEG, 2025

Pada tabel di atas, terkait kebutuhan sumber daya ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, menunjukkan perbandingan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan. Pada tabel tersebut, terlihat jumlah ASN yang tersedia di beberapa jabatan ada yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan ada pula yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tabel di atas, jumlah ASN yang tersedia sebanyak 35 orang ASN, sementara kebutuhan mencapai 80 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 45 orang ASN.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Semester I Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan pada jabatan jabatan tertentu. Oleh karena itu, strategi pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2025–2029, khususnya dalam konteks perencanaan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien

Tabel 2.5
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pendidikan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
2	Administrator	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7		8
3	Pengawas	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	D-III/ Sarjana Muda	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
4	Fungsional	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	S-1/D-IV	8	8	D-IV/ Diploma-IV	1	
						S-1/ Sarjana	5	
						S-2/ Pascasarjana	2	
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-2/ Pascasarjana	1	
		Pamong Budaya Ahli Pertama	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Perencana Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/ Sarjana	1	
		Pranata Komputer Terampil	D-III/ Sarjana Muda	1	1	D-III/ Sarjana Muda	1	
5	Pelaksana	Pelaksana	SMA/ Sederajat	16	16	S-2/ Pascasarjana	2	
						S-1/ Sarjana	8	
						D-IV/ Diploma-IV	1	
						D-III/ Sarjana Muda	2	
						SMA/ Sederajat	3	
Jumlah				36	36		36	

Sumber : BKPSDM, 2025

Pada tabel di atas, terkait rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, menggambarkan data yang mencakup jenis jabatan, nama jabatan, syarat minimal pendidikan, jumlah pegawai yang ada, kesesuaian pendidikan dengan persyaratan, serta rekomendasi pengembangan pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, pada tabel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual kualifikasi pendidikan pegawai sekaligus arah perbaikan yang diperlukan kedepannya. Syarat minimal Pendidikan sesuai dengan ketentuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/8-BM.02.01/SO/K/2024, tanggal 20 juni 2024, Hal: Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Adminstrator memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/ D-IV. Untuk Jabatan Pengawas memiliki syarat minimal pendidikannya adalah D-III/ Sarjana Muda. Untuk Jabatan Fungsional memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/ D-IV atau D-III/ Sarjana Muda. Dan untuk Jabatan Pelaksana syarat minimal pendidikannya adalah SMA/Sederajat.

Tabel 2.6
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Pelatihan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	2	3	4	5	6
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Kebudayaan	1
				Pelatihan Teknis Kepariwisataan	1
2	Administrator	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Bidang Ekonomi Kreatif	1
				Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
				Pelatihan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif	1
				Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1
		Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Kebudayaan	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe C	1
		Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
				Pelatihan Teknis Kepariwisataan	1
				Pelatihan Teknis Pengawasan Usaha Pariwisata	1
				Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe C	1
		Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
				Pelatihan Komunikasi/Content Creator	1
				Pelatihan Teknis Bahasa Asing	1
				Pelatihan Teknis Kepariwisataan	1
				Pelatihan Teknis Manajemen Event	1

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	2	3	4	5	6
				Pelatihan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif	1
3	Pengawas	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
4	Fungsional	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	8	Pelatihan Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	8
				Pelatihan Teknis Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	8
				Pelatihan Teknis AI for Content Creation	1
				Pelatihan Teknis Junior Graphic Designer	1
				Pelatihan Teknis Pendamping Pendaftar HKI	1
				Pelatihan Teknis Pengawasan Usaha Pariwisata	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe C	1
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan	1
				Pelatihan Teknis Analisis Kebijakan	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	1
				Pelatihan Teknis Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	1
		Perencana Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Perencana	1
5	Pelaksana	Penelaah Teknis Kebijakan	9	Pelatihan Dasar Pamong Budaya	1
				Pelatihan Teknis Kebudayaan	2
				Pelatihan Teknis Kepariwisataaan	3
				Pelatihan Teknis Manajemen SDM Aparatur	1
				Pelatihan Teknis Nilai Budaya Dasar	1
				Pelatihan Teknis Pamong Budaya Kesenian	1
				Pelatihan Teknis Pendamping Pendaftar HKI	1
				Pelatihan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif	2
				Pelatihan Teknis Pengembangan Kebudayaan Daerah	1
		Pengadministrasi Perkantoran	3	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	2
		Pengolah Data Dan Informasi	2	Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
Jumlah			31		64

Sumber : BKPSDM, 2025

Pada Tabel di atas terkait Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, berisi gambaran perencanaan program pelatihan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025–2029. Tabel ini memuat data jenis jabatan, nama jabatan, jumlah pegawai yang ada saat ini, rencana pelatihan yang akan diikuti, serta jumlah pegawai yang direncanakan mengikuti pelatihan. Tujuan utama dari tabel ini adalah untuk memastikan setiap jabatan memiliki arah pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui jalur pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) yang sudah disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Disparbud Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)					Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Unit	3				2	2	2	2	11
2	Tanah Untuk Bangunan Museum	Unit	1				-	-	1	1	3
3	Stationary Generating Set	Unit	1				-	1	1	1	4
4	Sedan	Unit	2				-	1	-	-	3
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3				-	1	2	1	7
6	Pick Up	Unit			1		1	1	-	1	4
7	Sepeda Motor	Unit	2		9		3	3	-	-	17
8	Battery Charge	Buah			1		5	3	1	1	11
9	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	4				1	1	1	1	8
10	Kursi Putar	Buah	5				1	-	-	-	6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)					Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	
11	Mesin Kontrol Jaga	Unit			1		-	-	-	-	1
12	Lemari Besi/Metal	Buah	7		3	2	3	1	1	1	18
13	Lemari Kayu	Buah	5		5		3	3	3	3	22
14	Rak Kayu	Buah			2		1	1	1	1	6
15	Filing Cabinet Besi	Buah			1		3	3	3	-	10
16	Filing Cabinet Kayu	Buah	10		15		-	-	-	-	25
17	Lemari Kaca	Buah			2		1	-	-	-	3
18	Lemari Makan	Buah			1		2	1	-	-	4
19	CCTV	Set	58				2	-	-	-	60
20	Papan Visual/Papan Nama	Unit			1		3	-	-	-	4
21	White Board	Buah			2		1	1	-	-	4
22	Alat Penghancur Kertas	Unit	2		2		-	1	-	-	5
23	Mesin Absensi	Unit	1				1	1	-	-	3
24	Overhead Projector	Unit			2		-	-	-	-	2
25	Panel Pameran	Unit	3				-	-	-	-	3
26	LCD Projector / Infocus	Unit	-		2		-	-	-	-	2
27	Papan Nama Instansi	Buah	5				2	1	-	-	8
28	Papan Pengumuman	Buah	12		7		1	1	-	-	21
29	Meja Kerja Besi/Metal	Buah			5		2	1	-	-	8
30	Sice	Buah	1		5		2	-	-	-	8
31	Meja Rapat	Buah			3	1	2	-	-	-	6
32	Workstation	Buah					30	-	-	-	30
33	Meja 1/2 Biro	Buah	1		10		10	-	-	-	21
34	Kursi Rapat	Buah	350			18	20	20	-	-	408
35	Kursi Putar	Buah	17		7		12	-	-	-	36
36	Kursi Biasa	Buah	50		1		300	-	-	-	351
37	Kursi Lipat	Buah			27		-	-	-	-	27
38	Sofa	Set	2				2	2	-	-	6
39	Mesin Pemotong Rumput	Unit			1		1	1	-	-	3
40	Lemari Es	Unit	1		3	1	2	1	-	-	8
41	A.C. Sentral	Unit			1		1	-	-	-	2
42	A.C. Split	Unit	19		13	1	5	1	-	-	39
43	Kipas Angin	Unit	2		4		-	-	-	-	6
44	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1				2	2	2	-	7
45	Televisi	Unit	4		5		2	1	-	-	12
46	Lemari Kayu	Buah	5				1	1	-	-	7
47	Loudspeaker	Unit	4		1		2	-	-	-	7
48	Sound System	Unit	2		10		2	-	-	-	14
49	Megaphone	Unit	1		1		2	-	-	-	4
50	Microphone	Unit	5		8		1	-	-	-	14

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi Sampai Dengan 2024 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)					Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	
51	Microphone Floor Stand	Unit			2		2	2	-	-	6
52	Mimbar/Podium	Unit			3		2	2	-	-	7
53	Handy Cam	Unit	1		1		1	-	-	-	3
54	Camera Video	Unit	1				2	-	-	-	3
55	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1				5	-	-	-	6
56	Tangga Aluminium	Buah			1		1	1	1	1	5
57	Dispenser	Unit	4		2		3	2	2	2	15
58	Alat Pemadam/Portable	Buah	4				6	-	-	-	10
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah			1		6	-	-	-	7
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	33				10	-	-	-	43
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah					5	-	-	-	5
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	34		1		-	-	-	-	35
63	Audio Amplifier	Unit					1	-	-	-	1
64	Audio Filter	Unit			1		1	-	-	-	2
65	Microphone / Wireless MIC	Unit	1		1		6	-	-	-	8
66	Microphone Connector Box	Unit	1				2	-	-	-	3
67	Paging Mic	Unit	4		2		10	-	-	-	16
68	Audio Maximizer	Unit			1		1	-	-	-	2
69	Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	Unit					1	1	1	-	3
70	(Speaker Ruangan)	Unit					2	-	-	-	2
71	Drone	Unit					1	-	-	-	1
72	Perlengkapan Wayang Golek	Set					1	-	-	-	1
73	Diorama Pameran	Buah					10	-	-	-	10
74	Smart ICE Board Panel 50 Inch	Unit					2	-	-	-	2
75	Smart ICE Board Panel 75 Inch	Unit					1	-	-	-	1
76	Meja Resepsionis	Buah					1	-	-	-	1
77	Kursi Roda	Buah					3	-	-	-	3

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja Disparbud, maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	FASILITAS PENDUKUNG												
1	Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.	√						3					3
2	Petugas parkir	√						4					4
3	Pemeriksaan karcis/ kartu parkir	√											0
4	CCTV Lokasi Parkir		√	1				2		2	2		7
5	Penitipan jaket/ helm	√						1	1	1			3
6	Pelindung (Kanopi/atap bahan lain)		√	2				1	1	1	1		6
B	FASILITAS WAJIB												
1	Kursi tunggu	√						2	1	1	1	1	6
2	Pendingin/ sirkulasi ruangan		√	20				2	2	2	2	2	30
C	FASILITAS PELENGKAP												
1	Mesin antrian dilengkapi monitor	√											0
2	Televisi		√	1		3		1	1	1	1	1	9
3	Bahan bacaan		√	20									20
4	Pengisi daya baterai alat komunikasi/ charger booth		√	1				1	2	1	1		6
5	Hotspot/wifi		√	4				3	3	2	2		14
6	Air minum		√	4				2	1	2	1		10
D	TOILET LAYAK PAKAI												
1	Toilet pria dan wanita		√	4				3					7
2	Wastafel		√	4				2		2		2	10
3	Toiletries		√	4				4					8
4	Air bersih		√	3									3
5	Monev intensitas petugas membersihkan toilet		√	6				3	3	3	3		18
E	SARPRAS KELOMPOK RENTAN												
1	Kursi roda/tongkat/ kruk	√						3					3
2	Pintu masuk yang mudah diakses		√	2				1	1	1			5
3	Step lobby/ ramp/ jalan landai dengan pegangan rambat	√						1		1	1		3
4	Lift khusus disertai huruf braille	√											0
5	Selasar yang menghubungkan semua ruangan		√	1				1		1	1		4
6	Toilet disabilitas		√	2				2	2	2			8
7	Loket Prioritas	√											0
8	Ruang tunggu khusus	√						1	1	1			3

No	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Guiding block/jalur pemandu	√						1	1	1			3
10	Area parkir khusus		√	1				1		1	1		4
11	Alat bantu	√						1		1		1	3
12	Arena bermain anak/ area ramah anak	√											0
13	Ruang Laktasi	√						1		1	1		3
14	Petugas Pemandu	√						1		1			2
15	Ruang Tenang	√											0
F	SARPRAS PENUNJANG												
1	Fotocopy/ATK	√						1					1
2	P3K		√	1				2	2		2		7
3	APAR		√	6				2	2	2	2	2	16
4	Kantin	√						7		2		2	11
5	Ruang Ibadah		√	2				2		1	1		6
6	Jalur evakuasi/titik kumpul		√	1				1		1			3
7	Tempat Sampah		√	1				2	1	1	1	1	7
8	Tempat Penitipan Anak/ Tempat Bermain Anak	√											0
9	CCTV		√	8				2	2	2	2	2	18
G	SARANA FRONT OFFICE												
1	Petugas khusus		√	1				1		1			3
2	Meja/kursi		√	1				2		2			5
3	Layar/display informasi		√	1				1		2			4
4	Bahan cetak informasi layanan		√	1				2		2			5
5	Register tamu (manual/ elektronik)		√	1				1		1			3
H	SARANA PRASARANA RUANG KONSULTASI DAN PENGADUAN												
1	Kotak saran/pengaduan		√	1				1		1			3
2	Ruang khusus		√	1				1		1			3
3	Petugas khusus	√						2					2
4	Air minum/makanan ringan		√	1				1		1			3
5	Register Konsultasi dan Pengaduan		√	1				1		1			3
6	Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/ spanduk/ leaflet/ buku/ dokumen/ bahan cetak lain)	√						1					1

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Selain itu dalam upaya percepatan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, Disparbud dalam pelaksanaan tugas fungsinya telah melaksanakan pelayanan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.9
Sistem Informasi Yang Digunakan Untuk Pelayanan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peta Digital Kepariwisataaan (Perkawis)	Data dan sebaran lokasi Daya Tarik Wisata	2022	Disparbud	√	√	√	√	√
2	Layanan Informasi Kepariwisataaan (LAKSA)	Informasi dan Rekomendasi Daya Tarik Wisata	2022	Disparbud	√	√	√	√	√
3	Website Disparbud Kota Bogor	Profil Disparbud Kota Bogor	2022	Disparbud	√	√	√	√	√
4	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Data Perencanaan dan Penganggaran Serta Penatausahaan Keuangan	-	Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-	-
5	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG)	Data Realisasi Kinerja Sub Kegiatan	-	Bagian Adbang Setda Kota Bogor	-	-	-	-	-
6	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Pengadaan Barang dan Jasa	-	LKPP	-	-	-	-	-
7	Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik	Pengadaan Barang dan Jasa	-	LKPP	-	-	-	-	-
8	E-katalog	Pengadaan Barang dan Jasa	-	LKPP	-	-	-	-	-
9	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Surat Menyurat	-	Dinas Kominfo	-	-	-	-	-
10	Sibadra	Pengaduan Masyarakat	-	Dinas Kominfo	-	-	-	-	-
11	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Pengaduan Masyarakat	-	Kementerian PANRB	-	-	-	-	-
12	Sistem Aplikasi Akuntabilitas Pemerintah (SADAYA)	Data Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	2025	Pemerintah Kota Bogor	-	-	-	-	-
13	Sistem Pengukuran Reformasi dan Birokrasi (SURABI)	Data Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Data Kepegawaian	-	BKPSDM	-	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
15	Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMASDA)	Data Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	BKAD	-	-	-	-	-
16	Sistem Informasi Aspirasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan (SIAPMANG)	Data Usulan Musrenbang, Usulan Pokok Pokok Pikiran DPRD, Renja Perangkat Daerah, Monev Kinerja Perangkat Daerah	-	Disparbud	-	-	-	-	-
17	My ASN Digital	Platform digital manajemen ASN terpadu	-	BKN	-	-	-	-	-
18	Parbuddalamangka	Update data pariwisata dan kebudayaan kab/ kota se-jawa barat	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
19	Dapobud	Data Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	-	Kementerian Kebudayaan	-	-	-	-	-

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Disparbud pada periode Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Disparbud Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Disparbud Tahun 2019-2024. Selanjutnya untuk mengevaluasi capaian kinerja Disparbud selama periode tahun 2019-2024, dapat dilihat dari sejauh mana ketercapaian tujuan dan sasaran serta ketercapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Selain itu kinerja pelayanan Disparbud Kota Bogor juga dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Seluruh Ketercapaian tersebut secara rutin di monitoring setiap tahunnya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan Disparbud Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Seluruh kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan serta Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggung jawab Disparbud Kota Bogor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2020 – 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-11	-12	-16	-17
Terwujudnya pelestarian budaya dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan generasi muda	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/ budaya	5	7		10	0	142,86
			Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/ budaya	5	7		10	0	142,86
			jumlah keragaman jenis Event/Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	15	17	19	21	126,67	123,53
			Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	150	50	150	-	-	-
			Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	2	2	-	-	-	-
Terwujudnya Tata Kelola urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	B	BB	BB	100	100
			Nilai AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	B	BB	BB	100	100
			Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
			Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	80	80	80	100	100
			Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	100	100
			Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	100	100
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80	80	100	100	125	125

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2022 – 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
-1	-2	-4	-5	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-18	-19	-20
Terwujudnya pelestarian budaya			Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	7	30,84	76,50	30,84	76,54	97,59	441	248	128
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya		Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	7	30,84	76,50	30,84	76,54	97,59	441	248	128
		Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	38	42	38	41	54	224	108	129
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	7	30,84	76,54	30,84	76,54	97,59	441	248	128
		Pembinaan Sejarah	Jumlah ketersediaan SDM pembinaan sejarah	195	200	200	0	0	50	0	0	25
		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	25	25	25	25	32	32	100	128	128
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	-	25	25	113,67	55,71	8,21	-	223	33
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud			Indeks Reformasi Birokrasi	80,01	81	82	54,72	78,08	89,78	68	96	109
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	80,01	81	82	54,72	78,08	89,78	68	96	109
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	BB	BB	A	A	A	A	100	100	100
			Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3,40	3,52	3,74	3,40	3,73	3,74	100	106	100

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
-1	-2	-4	-5	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-18	-19	-20
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor			Persentase Kunjungan Wisatawan	10	23,67	23,67	23,67	22,78	43,23	237	96	183
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.183.843	5.174.327	6.339.090	5.174.645	5.650.637	8.093.203	124	109	128
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		Persentase Kunjungan Wisatawan	10	23,67	23,67	23,67	22,78	43,23	237	96	183
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.183.843	5.174.327	6.339.090	5.174.645	5.650.637	8.093.203	124	109	128
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	55,00	70,00	70,46	69,98	70,45	70,48	127	101	100
			Persentase kunjungan wisatawan	10	23,67	23,67	23,67	22,78	43,23	237	96	183
		Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	4.183.843	5.174.327	6.339.090	5.174.645	5.650.637	8.093.203	124	109	128
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	-	0,16	0,83	-	0,17	0,86	-	106	104
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	30	35	67	32	65	75	107	186	112
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	40	45	75	44	65	175	110	144	233
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	30	30	75	32	65	75	107	217	100

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2020 – 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja					
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	%	%	%	%	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Poin	A	-					A		A								A		A		100	100	100	100	100	
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,52			8.337.485.607		9.496.583.327		9.593.231.765		10.571.802.631		3,52		-		7.891.819.960		9.155.618.995		9.228.279.794		10.296.966.515		-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	%		-	100	4.700.000	100	3.239.800	100	3.500.000	100	-		-	100	4.500.000	100	2.600.000	100	3.000.000	100	-	-	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		5	4.700.000	5	3.239.800	5	3.500.000	5	-	5		5	4.500.000	5	2.600.000	5	3.000.000	5		100	100	100	100	100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	%	100	-	100	6.592.964.441	100	7.077.536.999	100	7.246.774.090	100	8.543.550.920	100	-	100	6.389.066.312	100	6.864.073.235	100	6.962.369.254	100	8.415.004.827	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			34	6.592.964.441	31	7.077.536.999	35	7.246.774.090	36	8.474.787.920			34	6.389.066.312	31	6.864.073.235	35	6.962.369.254	36	8.359.321.827	-	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan				-			12		12	68.763.000						-	12	-	12	55.683.000	-	-	-	100	100	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	-	100	699.676.200	100	798.247.900	100	773.801.200	100	506.110.400	100	-	100	553.777.688	100	728.240.190	100	733.513.206	100	483.591.159	100	100	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket			1	97.713.600	1	81.361.400	1	88.862.000	1	95.599.100			1	78.355.800	1	64.116.700	1	80.475.000	1	81.431.600	-	100	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			1	17.264.600	1	13.304.100	1	12.780.200	1	16.470.900			1	15.156.600	1	11.264.100	1	10.417.400	1	15.900.000	-	100	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			1	7.200.000	1	7.200.000	1	12.000.000	1	12.000.000			1	7.200.000	1	6.480.000	1	9.420.000	1	11.400.000	-	100	100	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			1	8.775.000	1	15.000.000	1	15.000.000		-				1	8.775.000	1	12.900.000		-	-	-	100	100	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			1	577.498.000	1	687.607.400	1	645.159.000	1	382.040.400			1	453.065.288	1	637.604.390	1	620.300.806	1	374.859.559	-	100	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%		-	100	187.169.900	100	349.527.500	100	199.205.200	100	115.787.200		-	100	168.627.000	100	311.640.000	100	196.014.500	100	108.069.000	-	100	100	100	100
	Pengadaan Mebel		unit			1	37.546.800									1	33.345.000						-	100	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			2	149.623.100	2	349.527.500	12	199.205.200	10	115.787.200			2	135.282.000	2	311.640.000	12	196.014.500	10	108.069.000	-	100	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%		-	100	574.523.066	100	726.947.128	100	672.291.675	100	986.630.311		-		543.839.560		719.572.250	100	651.439.324	100	881.888.936	-	0	0	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			1	105.343.450	1	113.097.840	1	160.078.235	1	292.004.115				88.356.505		106.476.758	1	143.802.634	1	188.879.372	#DIV/0!	0	0	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			1	469.179.616	1	613.849.288	1	512.213.440	1	694.626.196				455.483.055		613.095.492	1	507.636.690	1	693.009.564	#DIV/0!	0	0	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%		-	100	278.452.000	100	541.084.000	100	697.659.600	100	419.723.800		-		232.069.400		529.493.320	100	681.943.510	100	408.412.593	-	0	0	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			15	5.470.000	15	111.500.000	15	150.910.000	15	192.690.000				4.285.900		107.558.981	15	149.288.700	15	184.166.817	#DIV/0!	0	0	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			105	146.970.000	105	157.020.000	85	139.620.800	78	89.500.800				102.719.500		150.714.550	85	126.698.000	78	88.025.000	#DIV/0!	0	0	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			2	126.012.000	2	272.564.000	2	407.128.800	1	137.533.000				125.064.000		271.219.789	2	405.956.810	1	136.220.776	#DIV/0!	0	0	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	event		-	15	2.427.620.600	17	324.701.300	38	456.117.100	42	877.463.400		-	21	2.144.559.800	38	284.808.800	41	435.253.650	54	861.374.308	-	140	224	108	129
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan	kegiatan		-	2	2.116.201.000	2	203.291.000	2	269.718.700	2	251.360.000		-	2	1.837.054.800	2	174.501.400	2	248.994.650	2	250.070.000	-	100	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	kegiatan			2	2.089.951.000	2	203.291.000	2	269.718.700	2	151.360.000			2	1.810.804.800	2	174.501.400	2	248.994.650	2	150.505.000	-	100	100	100	100
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang			30	26.250.000					50	100.000.000			30	26.250.000				50	99.565.000	-	100	-	-	100	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	kegiatan		-	1	311.419.600	1	121.410.300	1	186.398.400	1	626.103.400		-	1	307.505.000	1	110.307.400	1	186.259.000	1	611.304.308	-	100	100	100	100
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek			1	154.793.000	1	121.410.300	1	186.398.400	1	626.103.400			1	152.300.000	1	110.307.400	1	186.259.000	1	611.304.308	-	100	100	100	100
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					1	156.626.600									1	155.205.000							-	100	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	%		-		715.384.200	7	1.216.658.100	30,84	1.063.577.800	77	40.795.000		-		649.745.000		1.178.490.090	76,50	1.061.045.705	97,59	40.590.000	-	#DIV/0!	0	248	128
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi	orang/ lembaga		-	20	715.384.200	20	1.216.658.100	25	1.063.577.800	25	40.795.000		-	20	649.745.000	20	1.178.490.090	25	1.061.045.705	40	40.590.000	-	100	100	100	160
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga			20	715.384.200	20	1.216.658.100	25	1.063.577.800	25	40.795.000			20	649.745.000	20	1.178.490.090	25	1.061.045.705	25	40.590.000	-	100	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah	orang		-		-		-		-	50	31.642.000		-		-		-		-	50	31.378.000	-	-	-	-	100
	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku sejarah yang terbina	orang		-		-		-		-	50	31.642.000		-		-		-		-	50	31.378.000	-	-	-	-	100
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	orang									50	31.642.000									50	31.378.000	-	-	-	-	100
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	unit		-	18	1.111.616.800	20	6.135.729.950	25	421.900.000	32	465.139.600		-	18	866.860.664	20	6.091.789.891	25	413.123.500	32	448.420.000	-	100	100	100	100
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	%									3												-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	objek		-	18	1.111.616.800	20	6.135.729.950	25	421.900.000	32	465.139.600		-	18	866.860.664	20	6.091.789.891	25	413.123.500	32	448.420.000	-	100	100	100	100
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek			18	1.111.616.800	20	6.135.729.950	25	421.900.000	32	465.139.600			18	866.860.664	20	6.091.789.891	25	413.123.500	32	448.420.000	-	100	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	persentase peningkatan kunjungan ke museum	%		-		-		-	25	16.505.000.000	56	92.420.000		-		-		-	55,71	15.287.170.867	8,21	91.886.000	-	-	-	223	15

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	orang		-		-		-	130.000	16.505.000.000	202.436	92.420.000		-		-		-	201.324	15.287.170.867	217.858	91.886.000	-	-	-	155	108
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	unit							1	16.505.000.000	1	92.420.000							1	15.287.170.867	1	91.886.000	-	-	-	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat Hunian akomodasi	%		-		1.295.823.000		553.529.500	70,00	920.386.700	70,46	100.679.900		-		1.253.437.700		544.371.250	70,45	909.921.250	70,48	100.457.900	-	-	-	101	100
		Persentase Kunjungan Wisatawan	%					23,67		23,67						22,78		42,23		-		-		-	96	178		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata baru	daya tarik		-	1	849.000.000	1	233.229.600	1	531.235.100	1	100.679.900		-		809.715.200		229.339.450	1	527.750.600	1	100.457.900	-	0	0	100	100
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	dokumen			7	849.000.000	3	233.229.600	1	83.960.000					7	809.715.200	3	229.339.450	1	82.533.500	1		-	100	100	100	-
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi							1	447.275.100								1	445.217.100			-	-	-	100	-	
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	dokumen									1	100.679.900								1	100.457.900	-	-	-	-	100	
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	kawasan		-		-		-	1	192.394.400		-		-		-		-	1	188.941.900		-	-	-	-	100	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja					
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	Realisa si	Rp (Juta)	%	%	%	%	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	dokumen							2	192.394.400									2	188.941.900			-	-	-	100	-	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	destinasi		-		446.823.000		320.299.900	1	96.527.200		-		-		443.722.500		315.031.800	1	92.998.750		-	-	-	-	100	-	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kotaaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	dokumen							1	96.527.200								-	1	92.998.750			-	-	-	100	-	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi			1	246.453.000									1	244.837.500							-	100	-	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	laporan			1	200.370.000	2	320.299.900							1	198.885.000	2	315.031.800						-	100	100	-	-
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi	pelaku usaha		-		-		-	100	100.230.000		-		-		-		-	240	100.230.000		-	-	-	-	240	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	dokumen							1	100.230.000									1	100.230.000			-	-	-	100	-	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisatawan	orang	2.500.000	-	3.803.494	301.352.160	4.183.843	515.583.500	5.174.327	1.374.529.000	6.399.090	354.724.700	3.457.722	-	3.734.340	296.174.216	5.174.645	482.780.000	5.650.637	1.353.970.160	8.093.203	348.998.450	138	98	124	109	126	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan wisatawan	orang	2.500.000	-	3.803.494	301.352.160	4.183.843	515.583.500	5.174.327	1.374.529.000	6.399.090	354.724.700	3.457.722	-	3.734.340	296.174.216	5.174.645	482.780.000	5.650.637	1.353.970.160	8.093.203	348.998.450	138	98	124	109	126
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen					1	35.999.900	1	234.854.800	1	97.868.700					1	26.730.000	1	226.410.800	1	97.483.450	-	-	100	100	100
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan			2	199.602.400	5	402.402.100	4	1.002.019.000	5	209.646.000			2	196.835.000	5	381.635.000	4	996.269.910	5	204.647.000	-	100	100	100	100
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri	dokumen			1	101.749.760	1	77.181.500	2	137.655.200	1	47.210.000			1	99.339.216	1	74.415.000	2	131.289.450	1	46.868.000	-	100	100	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	produk		-		-	40	43.442.900	45	-	67	74.110.000		-		-	40	42.093.500	65	-	75	61.710.000	-	-	100	144	112
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kraetif	kegiatan		-		-	1	43.442.900		-	1	74.110.000		-		-	1	42.093.500		-	1	61.710.000	-	-	100	#DIV/0!	100
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	laporan									1	14.110.000									1	12.910.000	-	-	-	-	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen					1	43.442.900		-							1	42.093.500					-	-	100	-	-
	Fasilitasi Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	pelaku usaha									100	60.000.000									100	48.800.000	-	-	-	-	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	%							0,16		0,83								0,17		0,86		-	-	-	106	104
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	pelaku		-	15	873.206.400	30	1.302.510.800	35	627.743.300	67	419.849.400		-	15	840.230.250	30	1.283.085.700	65	617.462.800	75	417.308.186	-	100	100	186	112
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	orang			200		200		100		100				200		200		100		100		-	100	100	100	100
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	pelaku		-	15	873.206.400	30	1.221.128.200	35	564.876.800	67	419.849.400		-	15	840.230.250	30	1.204.548.700	65	555.718.000	75	417.308.186	-	100	100	186	112
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya				100	310.315.000	100	245.448.100							100	305.247.500	100	238.575.400					-	100	100	-	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang			100	428.156.000	100	625.680.100	50	83.800.000					100	425.267.750	100	620.516.600	50	83.045.000			-	100	100	100	-
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	orang							20	25.000.000									20	24.845.000			-	-	-	100	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Kinerja				
				2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan			1	134.735.400	1	350.000.000	1	406.076.800	1	106.895.200			1	109.715.000	1	345.456.700	1	399.840.400	1	105.992.730	-	100	100	100	100
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang									30	51.009.900									30	50.554.900	-	-	-	-	100
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang									40	211.944.300									40	211.260.556	-	-	-	-	100
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang							35	50.000.000	30	50.000.000						-	35	47.987.600	30	49.500.000	-	-	-	100	100
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi	orang		-		-	40	81.382.600	40	62.866.500	40	-		-		-	40	78.537.000	40	61.744.800		-	-	-	100	100	-
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang					40	81.382.600	40	62.866.500		-					40	78.537.000	40	61.744.800			-	-	100	100	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

Tabel 2.13.
Target dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
1	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	75	40	40	45	50	40		44	65	175	53,33		110,00	144,44	350,00
	KEBUDAYAAN															
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	10	10	10	30,84	76,54			30,84	76,5	97,59			308,40	248,05	127,50
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	18	18	25	25	25	18	18	20	25	32	100	100	80,00	100	128,00
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	15	17	17	38	39	19	21	38	41	54	126,67	123,53	223,53	107,89	138,46
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	2	2	2	1					1					100	
	PARIWISATA															
1	Kunjungan wisata	7.004.033	7.704.436	4.183.843	5.174.327	6.399.090	3.457.722	3.803.494	5.174.327	5.650.637	8.093.203	49,37	49,37	123,67	109,21	126,47
2	Lama kunjungan Wisata	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	100	100	100	100	100
3	PAD sektor pariwisata	130.679.959.712	168.205.200.000	277.530.000.000	312.500.000.000	338.400.000.000	140.292.952.222	185.661.140.961	287.860.632.150	328.823.584.610	361.077.093.168	107,36	110,38	103,72	105,22	106,70

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 2.14.
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Permasalahan dan Tindak Lanjut

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
TUJUAN 1 : Terwujudnya pelestarian budaya		Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	128 – 441 %	Sangat baik	Tingginya minat para pelaku seni/budaya terhadap pengembanga seni budaya	Sehubungan dengan tahun politik (2023-2024) dimana adanya aturan bahwa enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak tidak diperkenankan adanya event yang melibatkan banyak orang (tidak mendapatkan izin dari apparat keamanan)	Lunturnya budaya tradisional karena pengaruh globalisasi dan pergeseran gaya hidup	• Mendorong perkembangan seni tradisional dan modern dengan mengadakan lebih banyak kegiatan seni dan budaya • Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas dalam kegiatan seni budaya
Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya		Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	128 – 441 %	Sangat baik	Tingginya minat para pelaku seni/budaya terhadap pengembanga seni budaya	Sehubungan dengan tahun politik (2023-2024) dimana adanya aturan bahwa enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak tidak diperkenankan adanya event yang melibatkan banyak orang (tidak mendapatkan izin dari apparat keamanan)	Lunturnya budaya tradisional karena pengaruh globalisasi dan pergeseran gaya hidup	• Mendorong perkembangan seni tradisional dan modern dengan mengadakan lebih banyak kegiatan seni dan budaya • Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas dalam kegiatan seni budaya
	Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	108 – 244 %	Sangat baik	Tingginya minat para pelaku seni/budaya terhadap pengembanga seni budaya	Sehubungan dengan tahun politik (2023-2024) dimana adanya aturan bahwa enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak tidak diperkenankan adanya event yang melibatkan banyak orang (tidak mendapatkan izin dari apparat keamanan)	• Kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang tersedia seperti tidak tersedianya gedung kesenian yang berstandarisasi untuk sebuah pertunjukan • Berkurangnya antusiasme Masyarakat terhadap pertunjukan seni kontemporer • promosi dan informasi tentang kegiatan seni budaya belum maksimal	• Mendorong perkembangan seni tradisional dan modern dengan memperbanyak event seni budaya • Mengadakan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas guna pelestarian dan pengembangan seni budaya
	Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	128 – 441 %	Sangat baik	Tingginya minat para pelaku seni/budaya terhadap pengembanga seni budaya	Belum maksimalnya sarana dan prasaran penunjang untuk pemajuan dan pelestarian para pelaku seni tradisional	Belum meratanya SDM seni budaya tradisional yang tersertifikasi	Mengadakan pelatihan/woekshop untuk peningkatan kompetensi pelaku seni budaya

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
	Pembinaan Sejarah	Jumlah ketersediaan SDM pembinaan sejarah	0 - 25 %	cukup		Belum maksimalnya sosialisasi kepada stakeholder yang terkait Sejarah tentang program kegiatan pembinaan sejarah		- Memaksimalkan sosialisasi program pembinaan Sejarah - Mengadakan pelatihan seperti workshop dan bimtek untuk meningkatkan kompetensi para pelestari sejarah
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	100 – 128 %	Sangat baik	Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Kurangnya sdm yang memiliki kompetensi dalam hal cagar budaya	Mengajukan permohonan penambahan pegawai untuk jabatan pamong budaya kepada pemerintah pusat serta sertifikasi tim ahli cagar budaya
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	0 – 33 %	Cukup		Adanya perubahan sistem pengelolaan pada beberapa museum di Kota Bogor sehingga berpengaruh terhadap Tingkat kunjungan museum (peningkatan ticketing yang drastis)	Belum maksimalnya sdm permuseuman yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	Mengajukan usulan sertifikasi tenaga permuseuman seperti kurator, edukator, konservator dll.
TUJUAN 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	68 - 109	Baik	Tata kelola Pemerintahan di lingkungan Disparbud sudah baik didukung dengan komitmen pimpinan yang tinggi untuk secara berkelanjutan melakukan melaksanakan perbaikan kinerja dan didukung dengan budaya kerja seluruh ASN Disparbud yang berorientasi pada pelayanan, responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada	pencapaian tata kelola pemerintahan di lingkungan Disparbud masih dapat terus ditingkatkan, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain terkait kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan belum sepenuhnya memenuhi standar, standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan masih belum seluruhnya dapat diimplementasikan, digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diterapkan pada standar pelayanan dan SOP	Belum adanya Konsistensi dan komitmen seluruh ASN dalam melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan	Penguatan Tata Kelola pemerintahan di lingkup Disparbud melalui implementasi renaksi RB general mapun RB tematik Disparbud secara konsisten

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisian dan Akuntabel di Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
Outcome : Meningkatnya tata kelola Disparbud yang efektif, efisien dan akuntabel dan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	100	baik	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan keteuan yang berlaku Akuntabilitas kinerja Disparbud telah dilakukan evaluasi penilaian oleh APIP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Belum tersedianya instrumen sistem informasi terintegrasi untuk memudahkan evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Masih ada beberapa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja program yang belum tercapai secara optimal	monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh pencapaian kinerja program/ kegiatan, sub kegiatan memastikan hasil monitoring evaluasi kinerja digunakan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan rencana kerja berikutnya perlunya mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil penilaian baik unit kerja mapupun individu ASN

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	100-106	Baik	- Survey pengukuran kepuasan layanan telah dilakukan secara rutin triwulanan kepada seluruh penerima layanan Disparbud - evaluasi hasil survey kepuasan layanan Disparbud telah ditindaklanjuti dengan perbaikan kinerja, dimonitor secara berkala dan dilaporkan hasil tindaklanjutnya kepada pimpinan perangkat daerah untuk memberikan umpan balik	Belum optimalnya implementasi budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal adaptif, dan kolaboratif pada seluruh SDM Disparbud	- Cara berpikir kreatif dan inovatif ASN belum sepenuhnya menjadi budaya kerja sehingga belum mampu mempengaruhi perubahan kinerja pelayanan Disparbud - Belum terpenuhinya kebutuhan Aparatur (SDM) sesuai dengan standar dan belum meratanya kompetensi SDM baik pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana - belum optimalnya pelaksanaan reuiu, monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan, prosedur dan proses bisnis serta pengelolaan layanan data informasi dan pengaduan pelayanan pada Disparbud - Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel - Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana prasarana perangkat daerah - Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi serta pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik perangkat daerah	- Peningkatan kualitas SDM - peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta tatakelola Barang Milik Daerah - Peningkatan kualitas data dan informasi - peningkatan kualitas layanan pengaduan dan layanan Disparbud lainnya

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
TUJUAN 3 : Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor		Persentase Kunjungan Wisatawan	-62,26% - 43,23%	Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.457.722 - 8.093.203	Sangat Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		Persentase Kunjungan Wisatawan	-62,26% - 43,23%	Sangat Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.457.722 - 8.093.203	Sangat Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,45% - 70,48%	Baik	Lokasi yang strategis, dekat dengan atraksi wisata populer, pusat bisnis, serta terkoneksi dengan moda transportasi umum	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata Persaingan yang semakin ketat di sektor usaha akomodasi	Masih banyaknya akomodasi non- resmi	Pengawasan dan sosialisasi legalitas terhadap usaha pariwisata akomodasi non- resmi

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
		Persentase kunjungan wisatawan	-62,26% - 43,23%	Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata - Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata
	Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.457.722 - 8.093.203	Sangat Baik	Ketersediaan fasilitas akomodasi, transportasi, fasilitas pendukung/ amenitas pariwisata lainnya, serta ketersediaan variasi produk wisata baik wisata alam, budaya, dan modern/ buatan yang dapat mengakomodir semua segmen wisatawan	- Kebijakan/regulasi yang berdampak terhadap industri pariwisata - Masih kurangnya sumber daya penunjang promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat mencakup segmen pasar wisatawan yang lebih luas baik nusantara maupun mancanegara	- Kurangnya penerapan pariwisata berkelanjutan - Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana fasilitas pariwisata dan kelembagaan pengelola di Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pariwisata daerah - Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata - Masih rendahnya pemahaman konsep pariwisata ramah muslim	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata - Sosialisasi dan kampanye sadar wisata - Penguatan pengelolaan kelembagaan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi SDM pariwisata - Sosialisasi konsep pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,17% - 0,83%	Baik	Kebijakan pemerintah yang pro aktif dalam pengembangan sertifikasi kompetensi bagi SDM pariwisata	Biaya sertifikasi kompetensi yang belum terjangkau	- Masih rendahnya peran pengelola/pelaku usaha pariwisata dalam memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pegawai - Masih kurangnya kesadaran SDM pariwisata mengenai manfaat dan pentingnya memiliki sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing diri	- Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi SDM pariwisata

Tujuan/ Sasaran/ Program	Program	Indikator Kinerja	Tingkat Ketercapaian 2020-2024	Kategori Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	100-186	Sangat Baik	- Kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam menciptakan produk dan jasa kreatif - Ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi dan pemasaran produk kreatif - Adanya komunitas dan jaringan pelaku ekonomi kreatif yang kuat	- Keterbatasan Akses Pembiayaan - Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - Keterbatasan Sumber Daya Manusia: kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola bisnis dan pemasaran produk kreatif	- Masih rendahnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap produk kreatif lokal - Kurangnya kolaborasi dan jaringan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pihak lain seperti pemerintah dan industri - Terbatasnya akses ke pasar global dan persaingan yang ketat	- Meningkatkan Akses Pembiayaan - Meningkatkan Perlindungan HKI - Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	100-144	Sangat Baik				
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	100-186	Sangat Baik				

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

2.1.1. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Disparbud di bidang pariwisata dan kebudayaan, kelompok sasaran pelayanan Disparbud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15.
Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
1	Masyarakat Kota Bogor	● Fasilitasi kegiatan festival budaya dan kuliner lokal ● Edukasi sadar wisata dan pelestarian budaya ● Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas
2	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	● Pelatihan manajemen usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ● Pendampingan sertifikasi usaha pariwisata ● Promosi produk ekonomi kreatif melalui pameran dan digital marketing
3	Seniman dan budayawan	● Fasilitasi ruang ekspresi seni dan budaya ● Dukungan penyelenggaraan event seni dan budaya ● Pemberian penghargaan dan insentif bagi seniman dan budayawan berprestasi
4	Pelajar dan mahasiswa	● Program edukasi wisata dan kebudayaan melalui sekolah/ kampus ● Lomba kreativitas seni dan budaya ● Kegiatan pembinaan duta wisata dan generasi muda sadar budaya
5	Wisatawan domestik dan mancanegara	● Pengembangan paket wisata tematik Kota Bogor ● Peningkatan layanan informasi wisata berbasis digital ● Penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional
6	Pemerhati pariwisata dan kebudayaan	● Forum diskusi, seminar, dan workshop pariwisata & budaya ● Penyediaan data dan informasi pariwisata-budaya yang transparan ● Kerja sama penelitian dan publikasi terkait pariwisata dan kebudayaan
7	Komunitas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya	Kerjasama, kolaborasi dalam menyelenggarakan event yang diselenggarakan oleh komunitas

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

●

2.1.4. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Disparbud di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang menjadi mitra dalam pemberian pelayanan Disparbud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16.
Mitra Perangkat Daerah Pemberian Layanan

No	Mitra Perangkat Daerah	Kegiatan Layanan
1	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan	Pengembangan Penguatan Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Penguatan Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif
3	Kamar Dagang dan Industri Kota Bogor	Penguatan dan Pengembangan Smart Tourism Kota Bogor
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan Serta Promosi Kepariwisataaan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
5	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
6	Badan Pusat Statistik	Penyediaan dan sinkronisasi data
7	REKA Bogor	● Literasi/sosialisasi ekonomi kreatif ● Pelatihan/workshop subsektor ekonomi kreatif ● Pendampingan/pemberdayaan ekonomi kreatif ● Seminar/talkshow ekonomi kreatif ● Pelaksanaan event ekonomi kreatif termasuk perlombaan
8	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	● Kolaborasi dan sinergitas pengembangan pariwisata ● Pembinaan hotel, restoran, dan café ● Peningkatan kualitas SDM pariwisata ● Pemasaran pariwisata ● Standardisasi hotel, restoran, dan café
9	Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	● Kolaborasi dan sinergitas pengembangan kepariwisataan ● Pemasaran kepariwisataan ● Penyelenggaran event kepariwisataan

No	Mitra Perangkat Daerah	Kegiatan Layanan
10	Forum Sanggar/ Padepokan/ Komunitas/ lembaga kebudayaan lainnya	● Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar ● Pendampingan Sanggar dalam pembuatan karya
11	Event Organizer	Kolaborasi penyelenggaraan event/kegiatan
12	Tim Ahli Cagar Budaya	● Fasilitasi sidang penetapan cagar budaya ● Fasilitasi kajian literasi terkait cagar budaya
13	Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)	● Kolaborasi dan sinergitas pengembangan pariwisata ● Pembuatan paket wisata ● Peningkatan kualitas SDM pariwisata ● Pemasaran pariwisata
14	Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA)	● Kolaborasi dan sinergitas pengembangan pariwisata ● Pembinaan terhadap kualitas layanan dan standardisasi hotel ● Peningkatan kualitas SDM pariwisata khususnya di sektor pariwisata ● Pemasaran pariwisata
15	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)	● Pengembangan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi pramuwisata Indonesia ● Pembinaan profesionalisme dan etika bagi pramuwisata ● Promosi dan pemasaran pariwisata
16	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	● Pengembangan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi SDM pariwisata ● Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 2.17.
Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDA TANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
1	KB.47	KSDPK	Syarifah Sofiah/ Sekda Kota Bogor	Diyan Putranto/ Dir. LSPP Nusantara	119/KB.47-Disparbud/2021	005/Lsp/SPK/X/2021	19 Oktober 2021	5	19 Oktober 2026	Pengembangan Kepariwisata melalui Uji Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri Pariwisata di Kota Bogor	
2	PKS.28	KSDD	Mochamad Ridwan Kamil / Gubernur Jawa Barat	Bima Arya/ Wali Kota Bogor		119/Perj.28-Disparbud/2021	25 Mei 2021	3	25 Mei 2024	Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3	KB.15	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Yuno Abeta Lahay/ Ka. PHRI , Syafei /Ka. Koprasi Konsumen Sadulur Mandiri Sejahtera	119/KB.15-Disparbud/2022	005/PHRI-kotabogor/III/2022, 01/KOP.SMS-MOU/III/2022	07 Maret 2022	3	07 Maret 2025	Kerja Sama Pemberdayaan dan pemasaran produk UMKM Kota Bogor di Hotel dan Restoran Anggota PHRI Kota Bogor	Pada tanggal 6 April 2022 sudah dilaksanakan rapat tindak lanjut untuk perjanjian kerjasama ini dengan hasil sebagai berikut :
											1. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan dihadiri oleh perwakilan dari PHRI Kota Bogor, Ketua Koperasi Konsumen Sadulur Mandiri Sejahtera, perwakilan DISPARBUD, perwakilan Dinas KUKM perdagangan dan perindustrian, perwakilan Bagian Pemerintahan, serta staff bidang pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
											2. Sejauh ini kegiatan yang sudah berjalan adalah penyerapan produk UMKM di Pulo Geulis oleh Hotel 101 Suryakencana tetapi ada kendala di jangka waktu pembiayaan. UMKM Pulo Geulis merasa berat jika harus menerima pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan menalangi biaya produksi hingga belasan juta. Oleh karena itu diperlukan peran Koperasi SMS untuk membantu UMKM Pulo Geulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDA TANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
											3. Meskipun demikian, Koperasi SMS masih merasa keberatan dengan margin yang dinilai terlalu kecil sehingga akan dicari formula yang tepat untuk mengatasi hal ini. 4. Koperasi SMS berharap, baik pihak Pemerintah Kota Bogor baik di lingkup dinas maupun kecamatan bisa mensosialisasikan kerja sama ini ke hotel-hotel dan pelaku UMKM yang ada di Kota Bogor sehingga akan makin banyak yang terlibat dalam kegiatan ini. 5. Sejauh ini pihak koperasi SMS sudah mulai melakukan penjajakan dengan 3 hotel yaitu hotel Royal Pajajaran, Hotel Zest, dan Hotel Permata untuk menyerap produk UMKM yang ada di Kota Bogor dan sudah dikurasi oleh koperasi SMS. 6. Ada 2 (dua) cara dalam melakukan penyerapan produk UMKM ini yaitu dengan cara: a) Supply ke hotel dengan sistem termin b) Memasukkan produk UMKM ke dalam pilihan menu di hotel dan restoran seperti misalnya yang sudah dilakukan oleh Koperasi SMS Adalah memasukkan peyek dan kerupuk produk UMKM ke Resto Kluwih dan kue balok produk UMKM ke resto Kopi Tugoh. 7. Pihak Koperasi SMS mensyaratkan pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini harus menjadi anggota Koperasi SMS dan membeli bahan baku produknya di koperasi SMS.

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDA TANGAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM siap membantu memfasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM kota Bogor dan sudah memberikan daftar UKM ke Koperasi SMS.
4	KB.31	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Seruni Dinitri /Ketua STP Bogor	119/KB.31- Disparbud/2022	020/MOU/STPB- KET/VI/2022	29 Juni 2022	5	29 Juni 2027	Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah Ada PKS
5	PKS.40	KSDPK	Atep Budiman / Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Arief Daryanto/Sekan Sekolah Vokasi IPB	119/Perj.40- Disparbud/2022	4828/IT3.S3/KS/20 22	11 April 2022	3	11 April 2025	Pendidikan, Pelatihan, penelitian, pengabdian Masyarakat dan Potensi Penempatan kerja	1. Menerima mahasiswa magang dari sekolah vokasi IPB 2. pembuatan story telling untuk 7 (tujuh) kampung wisata Kota Bogor oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB 3. pembuatan peta kuliner legendaris Kota Bogor oleh dosen Sekolah Vokasi IPB
6	PKS.104	KSDPK	Atep Budiman /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Padang Wicaksono /Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia	119/Perj.104- Disparbud/2022	650/PKS/VOKASI/U I/2022	05 Oktober 2022	5	05 Oktober 2027	Kegiatan Magang dan Pengembangan Kampung Wisata Kota Bogor	1. Penerimaan mahasiswa magang 2. Pendampingan kampung wisata cibuluh bulan april 2024
7	KB.58	KSDPK	Bima Arya/ Wali Kota Bogor	Christian Jonathan/ Chief Executive Officer PT Talenta Digital Berkarya	119/KB.58- Disparbud/2023	037/PKS/TID/VIII/2 023	13 Oktober 2023	5	13 Oktober 2028	Pengembangan dan Pelatihan Kecerdasan Buatan di Kota Bogor (Bogor Artificial Intellegence)	1. Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang lebih teknis dan operasional antara PT Talenta Digital Berkarya dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2. Penyusunan PKS sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini adalah PKS terkait Pengembangan dan Pelatihan Kecerdasan Buatan di Kota Bogor dalam tahap pembahasan 3. Pembuatan Chatbot bagi Dinas PAriwisata dan kebudayaan Kota Bogor (Laksa Bogor) dan pelaksanaan Virtual Tourism Competition yaitu pembuatan chatbot bagi kampung wisata"
8	KB.70	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Derinta Entas/ Direktur Politeknik Sahid Jakarta	119/KB.70- Disparbud/2023	035/MOU/PoltekSah id/XI/2023	17 November 2023	5	17 November 2028	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pendampingan kampung wisata 2. Belum ada PKS

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDA TANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG	IMPLEMENTASI
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
9	PKS.104	SINERGI	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Waito Wongateleng /Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor	119/Perj.104-Disparbud/2023	B-09/M.2.12/Gs/10/2023	11 Oktober 2023	2	11 Oktober 2025	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Pendampingan pelaksanaan Pembangunan musium Batu Tulis
10	PKS.122	KSDPK	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	SERUNI DINITRI /Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor	119/Perj.122-Disparbud/2023	038/MoU/STPB-KET/XII/2023	01 Desember 2023	5	01 Desember 2028	PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BOGOR	1. Penerimaan peserta didik untuk melaksanakan magang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2. Pendampingan kampung wisata
11	PKS.134	KSDPK	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	NANANG SISWANTO/ Direktur Marketing PT Agrinesia Raya	119 /Perj.134-Disparbud/2023	34/AR/BGR/MKT/N ONPJ/XII/2023	28 Desember 2023	5	28 Desember 2028	PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN BERSAMA LAPIS BOGOR SANGKURIANG	1. Supporting produk LBS saat penyelenggaraan kegiatan 2. Perencanaan event Pekan oleh-oleh Bogor
12	PKS.04	KSDPK	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Christian Jonathan (CEO PT Talenta Digital Berkarya)	500.12.17.1/Perj. 04-Disparbud/2024	044/PKS/TID/I/2024	10 Januari 2024	5	10 Januari 2024	Digitalisasi Kepariwisataan Melalui Pengembangan Kecerdasan Buatan	1. Pengembangan LAKSA Kota Bogor 2. penambahan fitur artiificial intelegen berupa rencanakan perjalanmu
13	PKS.16	KSDPK	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Arwin Syahputra /Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kamar Dagang dan Industri Kota Bogor	500.12.17.1/Perj. 16-DISPARBUD/2024	006/WKB/PKS/II/2024	29 Februari 2024	3	31 Desember 2026	Kerja Sama Penguatan dan Pengembangan	.
14	PKS.81	KSDPK	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	ARISSETYANTO NUGROHO / Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila	500.12.17.1/Perj. j.81-DISPARBUD/2024	460/MOA/FPar/UP/VII/2024	29 Juli 2024	5	29 Juli 2029	PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN DI KOTA BOGOR	1. Penerimaan mahasiswa magang 2. Pendampingan Kampung Wisata Saung Eling dalam penyelenggaraan Event
15	PKS.86	KSDD	YUDI SANTOSA /Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	Iceu Pujiati /Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	100.3.7.1/125/PKS/KS-Banhuk/VIII/2024	500.12.17.1/Perj.86-DISPARBUD/2024	28 Agustus 2024	5	28 Agustus 2029	PENGEMBANGAN SERTA PROMOSI KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF	Perencanaan Event Kolaborasi bersama dalam event ekonomi kreatif

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 2.18
Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Inovasi Eksisting			Rencana		
	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat
1	Perkawis	2023	Peta Digital Kepariwisataaan	Gemar Pariwisata (Gerakan Masyarakat Sadar Pariwisata)	2026	Partisipasi masyarakat dalam membangun sadar wisata dan sapta pesona
2	LAKSA	2024	Layanan Informasi Kepariwisataaan	Pengembangan aplikasi Perkawis dan LAKSA	2026	Peta Digital Kepariwisataaan dan Layanan Informasi Kepariwisataaan

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya telah diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, bahwa tugas Disparbud Kota Bogor yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sedangkan secara fungsi. Disparbud memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pembangunan Kota Bogor sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang memperhatikan peningkatan dari kualitas kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari berbagai aspek dalam pembangunan yang menjadi urusan pemerintah daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satunya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan seni budaya dan pariwisata dalam berbagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan menjadi salah satu potensi besar Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain kedua urusan tersebut dalam Peraturan Walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bertanggungjawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Ekonomi kreatif juga dianggap menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melihat berkembang pesatnya bidang usaha/industri sektor ekonomi kreatif.

Kota Bogor yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, maka dari itu pengembangan budaya dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dimana seperti yang dijelaskan dalam Rencana Induk Kepariwisataan 2010-2025 Indonesia, bahwa pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dalam Gunn (1994) dijelaskan memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan budaya dan pariwisata Kota Bogor sebagai pusat atau karakteristik utama salah satu destinasi wisata Provinsi Jawa Barat, karena adanya pengaruh budaya modern dan sejarah Kota Bogor. Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata perkotaan Bogor seperti, wisata belanja, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), dan wisata berbasis pendidikan (knowledge-based tourism). Pengembangan aktivitas wisata di Bogor mendorong peningkatan

pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara spontan dan tersebar tidak merata. Kota Bogor sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk destinasi wisata di Bogor dimana, kabupaten dan kota di luar Kota Bogor juga mengembangkan potensi-potensi budaya dan pariwisata. Kemudian, sarana-prasarana daerah lain yang juga ikut berkembang bersama dengan Kota Bogor tersebut saling mendukung dan melengkapi hingga menjadi satu kesatuan pariwisata wilayah Bogor. Maka, berbagai kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bogor dapat juga membantu dan saling mendukung kegiatan yang ada di daerah lain. Permasalahan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.19
Tabel Permasalahan Perangkat Daerah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bogor	Tekanan daya dukung lingkungan akibat meningkatnya jumlah destinasi dan industri pariwisata	Sebaran destinasi wisata belum terintegrasi dengan tata ruang perkotaan	Program Kemenparekraf terkait promosi pariwisata digital belum terimplementasi penuh di daerah	Belum optimalnya promosi pariwisata Jawa Barat di level kota/kabupaten	Promosi pariwisata Kota Bogor masih bersifat konvensional dan belum dilakukan secara masif melalui berbagai media.
2	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemasaran pariwisata	Minimnya sadar pariwisata masyarakat di kawasan destinasi wisata	Aksesibilitas menuju lokasi wisata belum optimal	Dukungan branding pariwisata nasional “Wonderful Indonesia” belum tersinergi dengan daerah	Branding “West Java in Motion” belum maksimal dikolaborasikan dengan kota	Partisipasi pelaku wisata, komunitas, dan UMKM dalam promosi masih rendah
3	Belum optimalnya daya saing pariwisata daerah	Risiko kerusakan kawasan heritage akibat aktivitas wisata	Penataan kawasan heritage dan kuliner belum jelas dalam RTRW	K/L (Kemenparekraf/ Kemendagri) menekankan penguatan destinasi heritage	Program provinsi fokus pada Ciletuh-Palabuhan Ratu Geopark dan belum memberi porsi besar ke Kota Bogor	Daya tarik wisata budaya dan heritage Bogor belum mendapat eksposur luas
4		akan munculnya dampak negatif kepariwisataan saat wisatawan membludak	Belum ada zona khusus event kota dalam RTRW	K/L mendorong digitalisasi event dan MICE	Event Jabar Juara (provinsi) masih dominan di Bandung Raya	Event Kota Bogor masih kurang promosi massif di berbagai platform media
5	Keterbatasan data statistik wisatawan	Data lingkungan wisata (emisi, limbah) kurang terintegrasi	Belum terpetakan ruang terbuka hijau untuk wisata	K/L menekankan pentingnya big data pariwisata	Provinsi mendorong integrasi data pariwisata berbasis digital	Data kunjungan wisata Kota Bogor belum terdigitalisasi secara real-time
6	belum optimalnya pelaksanaan events di Kota Bogor	Belum adanya aturan atau kajian dampak event pariwisata	Minimnya venue atau tempat untuk pelaksanaan event nasional dan internasional	Program KEN yang terus dijalankan setiap tahun	Calender of event provinsi	Kebijakan penggunaan venue, dan sponsorship

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik berdampak pada penurunan daya saing dan produktivitas masyarakat pada kelompok usia produktif			Menguatnya kapasitas <i>enabling factors</i> ekosistem ekonomi kreatif	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Lemahnya sinergi dengan dunia Pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan Lembaga pelatihan vokasional
8	Kurangnya inovasi pada berbagai sektor ekonomi yang menghambat kemampuan daerah untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif			Menguatnya kapasitas <i>enabling factors</i> ekosistem ekonomi kreatif	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan
9	Pengembangan ekonomi Kota Bogor berbasis potensi wilayah belum optimal	Batasan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif	Kurangnya integrasi antara tata ruang dan kebutuhan pengembangan sektor kreatif	Menguatnya kapasitas <i>enabling factors</i> ekosistem ekonomi kreatif	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Belum optimalnya pengembangan potensi dan fasilitasi kemitraan
10	Produktivitas dan daya saing UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan IKM masih rendah	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam pengembangan ekonomi kreatif		Menguatnya kapasitas <i>enabling factors</i> ekosistem ekonomi kreatif	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Minimnya ketersediaan data tentang pasar, perilaku konsumen, dan tren ekonomi kreatif
11	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi potensial masih belum optimal			Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Terbatasnya promosi produk dan akses ke pasar
12	Pembajakan dan plagiarisme masih menjadi masalah serius di berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti film, musik, dan desain.			Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	Terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, kolaboratif, dan inklusif	Belum optimalnya ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Lunturnya budaya tradisional karena pengaruh globalisasi dan pergeseran gaya hidup	Mulai terkikisnya kepedulian Masyarakat terhadap OPK akibat arus modernisasi dan tren populer	Belum optimalnya sosialisasi di wilayah tentang penting nya pelestarian OPK kepada masyarakat	berkurangnya minat masyarakat terhadap OPK yang dianggap kuno	1. Mulai melunturnya nilai-nilai kebudayaan asli daerah ketika sektor budaya digabungkan dengan sektor pariwisata yang berorientasi ekonomi. 2. Minat masyarakat semakin menurun dalam melestarikan budaya daerah serta dampak buruk modernisasi dan pengaruh budaya asing yang tidak disaring dengan baik. 3. Ketimpangan jumlah SDM dalam Pengelolaan OPK dan Cagar Budaya	Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dan kolaborasi pemajuan OPK
		Mulai terkikisnya kepedulian Masyarakat terhadap seni budaya tradisional akibat arus modernisasi	pelestarian seni budaya tradisional semakin berkurang di wilayah karena perkembangan zaman	Kurangnya SDM dalam bidang seni budaya dan tradisi yang tersertifikasi		Belum meratanya SDM seni budaya tradisional yang tersertifikasi
14	Kurangnya apresiasi terhadap warisan budaya dan pelestarian serta perlindungan terhadap object cagar budaya dan warisan budaya tak benda	Objek Cagar Budaya belum terpelihara secara maksimal	Cagar budaya/ ODCB belum dapat dimaksimalkan sebagai destinasi wisata	Minimnya pembiayaan sertifikasi Juru pelihara, konservasi, preservasi dan perlindungan Warisan budaya dan alam	1. Penetapan Cagar Budaya yang belum maksimal di beberapa daerah. 2. Pengelolaan Cagar Budaya yang belum optimal dilihat dari kompetensi juru pelihara yang belum sesuai standar. 3. kurang adanya prioritas anggaran untuk perbaikan dan pengelolaan Cagar Budaya 4. SDM dalam Pengelolaan OPK dan Cagar Budaya	Belum terlaksananya sertifikasi dan peningkatan kompetensi Juru pelihara
		Pelayanan dan pemeliharaan koleksi museum belum maksimal	Museum belum dapat dimaksimalkan sebagai destinasi wisata	belum optimalnya kompetensi tenaga ahli permuseuman		Belum terlaksananya sertifikasi dan peningkatan kompetensi SDM Museum
						Belum tersedianya fasilitas pelatihan bagi pelaku pelestari sejarah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Potensial	Peningkatan jumlah wisatawan menyebabkan peningkatan sampah, polusi udara, dan pencemaran air. Maka, dibutuhkan keterlibatan masyarakat lokal, pengelolaan dampak lingkungan, dan pelestarian budaya dalam menciptakan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang.	Konversi lahan untuk pengembangan pariwisata, seperti pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya, sering kali mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan ruang pariwisata dengan kebutuhan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi. Dibutuhkan diversifikasi dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata baru yang lebih beragam dengan tetap mengintergrasikan aspek konservasi lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan dan mengutamakan keberlanjutan, seperti pengembangan transportasi berbasis energi terbarukan, serta fasilitas publik yang lebih baik di Daya Tarik Wisata	Masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam pengembangan kegiatan pariwisata,	
16	Belum Optimalnya Bogor Sebagai Tujuan Wisata dan MICE Ibukota				Belum optimalnya pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata	Kurangnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan
17	Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal:				Masih terbatasnya penyebaran dan pemahaman konsep pariwisata halal atau muslim friendly tourism untuk mengakomodir wisatawan dari negara-negara mayoritas Muslim	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
18	Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia"				Belum optimalnya penguatan sumber daya manusia dalam sector ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Hal yang menjadi isu strategis tersebut menjadi perhatian khusus atau prioritas yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan baik yang prioritas, logis, atau sektoral (Permendagri No 86, 2017). Dampak yang dirasakan dari isu strategis akan muncul secara substansial bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029. Maka isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk perencanaan pembangunan dua tahun ke depan tahun 2025-2029 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20
Tabel Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PARIWISATA						
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Kurangnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan	Implementasi langkah-langkah berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata memberikan dampak positif yang signifikan bagi kualitas hidup manusia dan kelestarian lingkungan dalam mencapai ekonomi hijau dan ekonomi inklusif	Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, pencemaran plastik	Krisis kualitas udara di perkotaan, krisis sampah plastik, serta perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang memperparah bencana alam	Pembangunan kepariwisataan berbasis IPTEK, meliputi; pengelolaan tata ruang yang terintegrasi serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang lebih lestari.	Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan secara konsisten
	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Prinsip ekonomi sirkular adalah pemberdayaan dan keterlibatan semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa manfaat keanekaragaman hayati dapat dinikmati oleh semua, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Dengan mengintegrasikan ketiga prinsip ekonomi ini ke dalam upaya pelestarian, kita tidak hanya berinvestasi dalam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan				Pariwisata sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan wilayah
	Belum optimalnya peran Kelompok Sadar Wisata sebagai penggerak	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan				Kelembagaan kepariwisataan yang andal sebagai agen

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengembangan pariwisata berkelanjutan	terkait dengan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pengaturan penggunaan air, pengelolaan limbah, pengurangan polusi, dan perlindungan ekosistem				perubahan dalam melakukan transformasi kepariwisataan
	Branding pariwisata Bogor belum kuat	Perlunya identitas wisata khas Bogor (heritage, kota hujan, alam)	Persaingan destinasi regional	Branding nasional BBWI	Branding global kreatif & digital	Penguatan branding dan identitas wisata Kota Bogor yang konsisten
	Promosi digital belum optimal	Optimalisasi PERKAWIS & LAKSA	Integrasi promosi dengan transportasi (LRT/KCIC)	E-tourism nasional	Smart tourism & AI analytics	Optimalisasi promosi digital dan smart tourism
	Data wisatawan belum terkelola	Penguatan basis data wisata kota	Belum sinkron data lintas destinasi	Visitor analytics nasional	Big data tourism global	Penguatan sistem data & informasi pemasaran wisata berbasis digital
	Anggaran terbatas & minim co-branding	Alternatif pendanaan promosi lokal	PPP lintas daerah masih lemah	Co-funding dengan swasta	Co-branding destinasi global	Pengembangan skema pembiayaan alternatif promosi wisata
	SDM & literasi digital rendah	Perlu pelatihan konten kreatif lokal	Gap keterampilan digital antar daerah	UMKM Go Digital nasional	Literasi digital global	Peningkatan kapasitas SDM pemasaran wisata & literasi digital
	Kolaborasi multipihak belum optimal	Kolaborasi komunitas kreatif Bogor	Paket wisata lintas daerah belum solid	Pentahelix pariwisata nasional	Kolaborasi lintas negara	Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak (pentahelix)
	Sektor ekonomi kreatif	Masih minimnya optimalisasi	Geopolitik dan	Produktivitas	Pembangunan ekonomi	Transformasi ekonomi

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	belum berperan optimal dalam pertumbuhan perekonomian Kota Bogor	terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sejahtera	geoekonomi di Indopacific dengan pemain baru muncul di negara berkembang (Tiongkok) serta perdagangan internasional dengan axis baru di negara berkembang	ekonomi perkotaan rendah	yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal	melalui pengembangan sektor ekonomi potensial
	Minimnya ketersediaan data tentang pasar, perilaku konsumen, dan tren ekonomi kreatif					Sistem pengumpulan informasi terpadu
	Minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan	Inovasi sampah atau limbah menjadi produk bernilai	Inovasi berkelanjutan	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	Tren ekonomi kreatif yang berubah cepat	Kota Kreatif
	Lemahnya sinergi dengan dunia Pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan Lembaga pelatihan vokasional				Sinergitas yang belum optimal	Ketimpangan input dan output Pendidikan dengan kebutuhan industri
	Belum optimalnya ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal			Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Regulasi yang belum memadai	Tingkat apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual
	Terbatasnya promosi produk dan akses ke pasar		Globalisasi pasar			Pemasaran digital
	Belum optimalnya pengembangan potensi				Sinergitas yang belum	Berkembangnya kewirausahaan dan

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan fasilitasi kemitraan				optimal	industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan yang inklusif
URUSAN KEBUDAYAAN						
Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	Cagar Budaya dan Museum: Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang untuk cagar budaya dan museum	Perlu adanya penataan sarana dan prasarana pendukung Cagar Budaya / ODCB dan Museum	Belum maksimalnya Pemanfaatan Cagar budaya dan Museum	Sering Terjadinya Vandalisme dan pengrusakan Cagar Budaya dan Museum	Sering Terjadinya Vandalisme dan pengrusakan Cagar Budaya dan Museum	Menurunnya kepedulian Masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Museum
	OPK: Belum maksimalnya sumber data terkait OPK	Kurangnya regenerasi pelestari OPK yang berdampak terhadap eksistensi OPK, sehingga banyak OPK hampir punah	Kurangnya kepedualian Masyarakat terhadap OPK serta pendataan, sehingga mudah diklaim oleh bangsa lain	Banyaknya OPK yang belum memiliki HAKI	Minimnya regenerasi maestro dan literasi OPK	Perkembangan zaman dan derasnya arus modernisasi
	Kesenian Tradisional: Belum optimalnya kompetensi SDM kesenian tradisional, lembaga seni, dan pranata seni	Mulai terkikisnya kepedulian Masyarakat terhadap seni budaya tradisional akibat arus modernisasi	Semakin derasnya pengaruh seni budaya asing karena pengaruh teknologi	Belum Optimalnya pelestarian Kesenian Tradisional	Kurangnya SDM dalam bidang seni budaya dan tradisi yang tersertifikasi	Meredupnya khazanah kesenian tradisional

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik dan menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur serta dievaluasi melalui indikator yang telah ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program, sasaran, maupun tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Namun, dalam konteks ini indikator difokuskan sebagai alat ukur pencapaian kinerja pada level outcome dan impact. Penetapan indikator menjadi penting untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga penggunaan sumber daya dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2045, serta memperhatikan dinamika kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik secara global, nasional maupun regional, maka Visi Kota Bogor Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :

“BOGOR BERES, BOGOR MAJU”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

- **Bogor Beres** artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.
- **Bogor Maju** artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

Selanjutnya Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor Tahun 2025- 2029 yaitu :

1. **Bogor Cerdas**, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan

untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan Lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.

2. Bogor Sehat, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya.
3. Bogor Sejahtera, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Bogor Lancar, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disparbud dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Disparbud diarahkan untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 2025-2029, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sasaran RPJMD: Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	7,06%	7,85%	8,63%	9,41%	10,2%	10,98%	11,76%	
		Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	7,06%	7,85%	8,63%	9,41%	10,2%	10,98%	11,76%	
			Meningkatnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	7,01%	7,63%	8,25%	8,87%	9,48%	10,1%	10,72%	
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	8%	12%	16%	20%	24%	28%	32%	
2	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,65	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	
		Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	89,78	89,80	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10	
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,74 Nilai	3,75 Nilai	3,76 Nilai	3,77 Nilai	3,78 Nilai	3,79 Nilai	3,80 Nilai	
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				SAKIP Tingkat Kota	Predikat	BB (78,29)	BB (79,6)	A (80,10)	A (80,65)	A (81,15)	A (81,50)	A (82,00)	
	Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	89,78	89,80	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10		
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (87,70)	A (87,75)	A (88,00)	A (88,25)	A (88,50)	A (88,75)	A (89,00)		
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/ITDA	Persen	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			Laju PDRB Sektor Jasa Akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	Angka	NA	7,43	7,54	7,64	7,71	7,75	7,77	
	Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat		Persentase kontribusi sektar akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (ADHB)	Persen	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06		
			Peningkatan Investasi Sektor Ekonomi Kreatif	Miliar Rupiah	NA	345,05	391,63	438,63	460,56	484,51	508,46		
			Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif	Orang	NA	883	911	940	980	985	997		
		Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	Persen	24,75%	20,56	18,79	19,05	19,22	19,38	19,54		
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	Persen	43,23%	8,10	8,10	8,11	8,11	8,12	8,12		
			Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	Persen	N/A	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2		

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

3.1.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi adalah upaya nyata yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
1	Norma: Pengembangan pariwisata berbasis keberlanjutan (<i>sustainable tourism</i>), pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Standar: Standar pelayanan Daya Tarik Wisata, standar kompetensi SDM pariwisata (SKKNI), standar pengelolaan Kampung Wisata, dan standar amenitas pariwisata. Prosedur: Mekanisme perencanaan, promosi, sertifikasi usaha pariwisata, dan tata kelola destinasi Kriteria: Kriteria penilaian daya tarik wisata unggulan, kesiapan digitalisasi pariwisata, serta indikator keterlibatan masyarakat dalam ekosistem pariwisata	Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan cultural & heritage tourism, pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta pengembangan ekonomi Pengembangan ekonomi Kota Bogor Pengembangan daya saing ekonomi	1. Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata 2. Meningkatkan daya saing pariwisata 3. Optimalisasi Kampung Tematik dalam meningkatkan Daya Tarik Wisata 4. Penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional di Daya Tarik Wisata 5. Kerjasama atau kemitraan dengan lembaga, perusahaan swasta, sekolah kejuruan dan /atau perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan cultural & heritage tourism, pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah event yang dilaksanakan di kota bogor
		Penataan dan penguatan pengembangan pariwisata dengan konsep hub kebudayaan dan industri sains kreatif	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	1. Peningkatan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan governansi kolaboratif 2. Kolaborasi hexahelix

No	Operasionalisasi NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
		Mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer kreatif nasional	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	1. Peningkatan pemasaran dan penguatan rantai nilai dan rantai pasok ekonomi kreatif 2. Peningkatan tata kelola dan manajemen data ekonomi kreatif
		Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, incubator bisnis dan pembiayaan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menopang daya saing daerah	1. Peningkatan inovasi dan kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif 2. Kolaborasi hexahelix
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menopang daya saing daerah	Peningkatan pembiayaan
		Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan Lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat kota	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Penguatan manajemen kekayaan intelektual ekonomi kreatif
		Peningkatan up-skilling dan reskilling SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembekalan kompetensi, alih kompetensi, dan peningkatan kompetensi kerja talenta ekonomi kreatif
	Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	1. Melestarikan dan menjaga warisan budaya lokal 2. mendorong perkembangan seni tradisional dan modern dengan mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya 3. menyediakan dukungan terhadap kelompok seni	Meningkatnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan	1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda 2. Penguatan pelestarian budaya lokal dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai

No	Operasionalisasi NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
		budaya untuk memberikan ruang bagi mereka dalam berkarya 4. Menyelenggarakan workshop dan seminar kebudayaan untuk meningkatkan kualitas SDM 5. Penguatan infrastruktur kebudayaan untuk mendukung pengembangan dan pelestarian kebudayaan 6. Mengedepankan kolaborasi antara seni tradisional dan seni modern untuk menciptakan karya yang lebih relevan dengan perkembangan zaman 7. mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan 8. Penyiapan aspek religiusitas, pendidikan inklusif, dan kebudayaan Masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif 9. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat 10. Penataan dan pengembangan kawasan pusaka sebagai kawasan strategis kota serta pelestarian cagar budaya 11. Perencanaan, penataan dan pengembangan Kawasan pusaka sebagai Kawasan strategis kota serta pelestarian cagar budaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah		program edukasi dan event budaya 3. Kolaborasi hexahelix
				1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda 2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional melalui sekolah atau

No	Operasionalisasi NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4	5
				lembaga seni 3. Menyelenggarakan kursus dan workshop untuk pelaku seni budaya demi meningkatkan skill manajerial 4. Kolaborasi hexahelix
				1. Menyelenggarakan workshop/bimtek untuk pelaku pelestari sejarah 2. Melakukan pendataan secara rutin para pelaku pelestari sejarah 3. Kolaborasi hexahelix 4. Sertifikasi para pelaku pelestari sejarah 5. Pengembangan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki sejarah
				1. Merawat dan mengelola situs-situs bersejarah 2. Pengembangan infrastruktur budaya 3. Pengembangan fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata 4. Kolaborasi hexahelix
				1. peningkatan kompetensi bagi para tenaga ahli permuseuman 2. Kolaborasi hexahelix 3. Digitalisasi museum

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

3.2 PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pentahapan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor disusun untuk siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen panduan 5 tahunan, kemudian penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran tahunan Renstra, dilanjutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, dan diakhiri dengan pelaporan kinerja (LAKIP) serta evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja berkelanjutan yang sesuai disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Pentahapan Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahapan	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah	Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Digital Pemerintahan	Transformasi Ekonomi Kreatif Menuju Inovasi Inklusif	Inovasi untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Perkotaan	Konsolidasi Capaian dan Fondasi Menuju Kota Sains Kreatif
Fokus Utama	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dengan memfasilitasi SDM Disparbud Kota Bogor untuk mengikuti sosialisasi, seminar/ webinar, diklat, pendidikan yang dapat mendukung meningkatkan kualitas kinerja dan pemberian pelayanan yang dilakukan, memetakan SDM dengan tepat (sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi sesuai dengan yang dikerjakan), Menciptakan inovasi, membangun budaya kerja akuntabel & profesional.	Merealisasikan inovasi, meningkatkan mutu layanan, pengembangan sarana dan prasarana guna mendukung layanan dan kegiatan operasional Disparbud Kota Bogor menjadi lebih efektif dan efisien, simplifikasi layanan dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan Disparbud	Mengalokasikan anggaran untuk program ekonomi kreatif dan UMKM, optimalisasi aset daerah untuk ruang kreatif (coworking space, event center, dll), evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan inovasi, capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan operasional, dan layanan, melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, mengoptimalkan inovasi dan layanan inklusif.	Penguatan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi yang telah dibangun dan dikembangkan dilaksanakan secara keberlanjutan, mengoptimalkan system informasi yang ada untuk efektivitas, efisiensi dan transparansi layanan dinas	Fokus Utama pada Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja 2025-2029, seluruh layanan Disparbud Kota Bogor dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi sehingga seluruh layanan dan proses administrasi terdigitalisasi secara rapih dan tertib

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan hasil penjenjangan kinerja (cascading kinerja) dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Berikut Kerangka Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD (Cascading) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

4.1. Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penjenjangan Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tersaji dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Tujuan : Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat				IK Sasaran RPJMD: Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen		
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen		
		Sasaran : Meningkatnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen		
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen		
			Meningkatnya penyelenggaraan pengembangan kebudayaan		jumlah event seni budaya di Kota Bogor	Event	Program: Pengembangan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Sub Kegiatan : Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah barang yang diserahkan untuk kegiatan POKIR</i>	Set	<i>B. Barang untuk Dijual/ Diserahkan kpd Masyarakat (POKIR)</i>	
					<i>Jumlah barang yang diserahkan untuk keg. Musrenbang</i>	Set	<i>B. Barang untuk Dijual/ Diserahkan kpd Masyarakat (Musrenbang)</i>	
					<i>Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data</i>	Dokumen	<i>Pemutakhiran Data PPKD Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah Kajian dan Data Base Warisan Budaya Tak Benda</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Kajian dan Data Base Warisan Budaya Tak Benda</i>	
					<i>Jumlah Data Pemetaan Rute Destinasi Wisata Budaya</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Data Pemetaan Rute Destinasi Wisata Budaya</i>	
					<i>Jumlah Rancangan Rencana Induk Kebudayaan</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kebudayaan</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Terlaksananya Kegiatan Cap Go Meh</i>	Kegiatan	<i>Cap Go Meh</i>	
					<i>Terlaksananya Kegiatan Helaran HJB</i>	Kegiatan	<i>HJB (Hari Jadi Bogor)</i>	
					<i>Terlaksananya pagelaran kesenian kegiatan Insidentil</i>	Kegiatan	<i>Insidentil (paket kecil)</i>	
					<i>Terlaksananya Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)</i>	Kegiatan	<i>Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)</i>	
					<i>Terlaksananya kegiatan Sidekah Bumi</i>	Kegiatan	<i>Sidekah Bumi</i>	
					<i>Terlaksananya Festival Marawis</i>	Kegiatan	<i>Festival Marawis</i>	
					<i>Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Budaya</i>	Kegiatan	<i>Gebyar Seni Budaya (Pasanggiri Degung, Angklung, Pupuh)</i>	
					<i>Terlaksananya kegiatan APEKSI</i>	Kegiatan	<i>APEKSI</i>	
					<i>Terlaksananya kegiatan JKPI</i>	Kegiatan	<i>JKPI</i>	
					<i>Terlaksananya kegiatan WJF</i>	Kegiatan	<i>WJF</i>	
					<i>Terlaksananya Pagelaran Wayang Golek</i>	Kegiatan	<i>Pagelaran Wayang Golek dalam rangka HJB</i>	
					<i>Terlaksananya Festival Kemasan Seni Pertunjukan Kota Bogor</i>	Kegiatan	<i>Festival Kemasan Seni Pertunjukan Kota Bogor</i>	
				Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	sertifikat	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Maestro, Penggiat, Pelestari dan Pelaku Seni Budaya Berprestasi</i>	Kegiatan	<i>Penjaringan dan Pemberian Penghargaan kepada Maestro, Penggiat, Pelestari dan Pelaku Seni Budaya Berprestasi</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya		Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	persen	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Jumlah lembaga seni tradisional yang dibina	Lembaga	Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	sertifikat	Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah peserta Diklat Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya</i>	Orang	<i>Diklat Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya</i>	
					<i>Jumlah peserta Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya</i>	Orang	<i>Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya</i>	
					<i>Jumlah Profil Data Base Lembaga dan Komunitas Seni Budaya</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Profil Data Base Lembaga dan Komunitas Seni Budaya</i>	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas tatakelola lembaga kesenian tradisional	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah peserta workshop manajemen tata kelola lembaga seni</i>	Kegiatan	Workshop Managemen Tata Kelola Lembaga Seni	
			Meningkatnya Pembinaan Sejarah		Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	persen	Program : Pembinaan Sejarah	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah	Kegiatan	Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah peserta workshop pelaku pelestarian sejarah kota bogor</i>	Orang	<i>Workshop Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah peserta Bimtek Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor</i>	Orang	<i>Bimtek Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah peserta Sertifikasi Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor</i>	Orang	<i>Sertifikasi Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor (Museum)</i>	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	unit	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah papan informasi & peta kota pusaka</i>	unit	<i>Pencetakan Papan Informasi & Peta Kota Pusaka</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah buku sejarah bogor</i>	buku	<i>Pencetakan Buku Sejarah Bogor</i>	
			Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase status ODCB menjadi CB	persen	Program : Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Penetapan cagar budaya peringkat kab/ kota	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Objek	Kegiatan : Penetapan cagar budaya peringkat kab / kota	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Objek	Sub Kegiatan : Penetapan cagar budaya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah objek cagar budaya yang tetapkan	Objek	Menetapkan ODCB menjadi CB	
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat kab / kota	
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	Sub Kegiatan : Perlindungan cagar budaya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>terlindungi objek diduga cagar budaya</i>	Objek	<i>Jasa juru pelihara cagar budaya</i>	
					<i>Jumlah Peraturan Wali Kota tentang cagar budaya</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Cagar Budaya</i>	
					<i>Jumlah Narasi ilmiah tentang sejarah di Kota Bogor</i>	Dokumen	<i>Kajian Penyusunan Narasi Ilmiah (Naskah Kuno, Prasasti, Artefak dan Peninggalan Sejarah lain) untuk Koleksi museum</i>	
					<i>Jumlah pemutakhiran data Cagar Budaya dan ODCB terupdate</i>	Dokumen	<i>Pemutakhiran Data Cagar Budaya dan ODCB Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah narasi 6 Deleniasi/ Wilayah Kota Pusaka</i>	Dokumen	<i>Penyusunan Narasi 6 Deleniasi/ Wilayah Kota Pusaka</i>	
			Meningkatnya kunjungan ke Museum		jumlah kunjungan ke museum	Orang	Program : Pengelolaan Permuseuman	
				Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	jumlah kunjungan ke museum	Orang	Kegiatan : Pengelolaan Museum Kab / Kota	
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah dokumen DED Desain Interior Museum Pajajaran	Dokumen	Penyusunan DED Desain Interior Museum Pajajaran	
					Jumlah dokumen DED Pembangunan Museum Pajajaran	Dokumen	DED Pembangunan Museum Pajajaran	
					Jumlah Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	paket	Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	
					Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	paket	Pembangunan Sarana & Prasarana Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	
					Jumlah Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	paket	Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	
					Jumlah Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	paket	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior Museum Pajajaran	
					Jumlah Jasa Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bogor	paket	Jasa Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bogor	
					Jumlah Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD Museum, Gedung Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif		Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pembentukan UPTD Museum, Gedung Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah unit koleksi museum	Unit	Pengadaan Penambahan Koleksi Museum	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah peserta Seritikasi, Diklat dan Bimtek Pengelola Museum	Orang	Seritikasi, Diklat dan Bimtek Pengelola Museum	
				Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Unit	Sub Kegiatan : Pengelolaan Koleksi Museum	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah pemeliharaan Koleksi Museum	Unit	Pemeliharaan Koleksi Museum	
				Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Layanan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional Museum	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah Operasional dan Promosi Kegiatan Museum	Layanan	Operasional dan Promosi Kegiatan Museum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tujuan : Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat				IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik	Angka				
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks				
		Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks			
						Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan			Nilai Hasil Survey Kepuasan	Nilai	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
						Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan Setiap Tahun	Inovasi			
			Terlaksananya pengadministrasian umum pelayanan perkantoran			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
							Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Perabot Kantor, Alat Listrik, karangan bunga, isi ulang air minum		Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Perabot Kantor, Alat Listrik, karangan bunga, isi ulang air minum	
							Jumlah sewa kendaraan		B. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	
								B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Rincian Output :		Rincian Aktivitas :		
						Jumlah fotocopy, dus arsip dan map dinas		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Dus Arsip, Map Dinas)		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						Rincian Output :		Rincian Aktivitas :		
						jumlah surat kabar/ majalah		Belanja Surat Kabar/ Majalah		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		
						Rincian Output :		Rincian Aktivitas :		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah paket makan dan minum rapat dan kegiatan		Penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan	
					Jumlah paket perjalanan dinas luar daerah		Penyediaan Biaya perjalanan dinas luar daerah	
					Jumlah paket perjalanan dinas luar negeri		Penyediaan Biaya perjalanan dinas luar negeri	
				Terlaksananya pengelolaan pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	persen	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
							Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	
					Jumlah mebel	unit	Belanja Modal Mebel	
					jumlah alat pendingin	unit	Belanja Modal Alat Pendingin	
					jumlah meja rapat	unit	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	
					jumlah lemari dan arsip	unit	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	
					jumlah personal computer	unit	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer)	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					jumlah kendaraan roda 4		Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Dan III	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					jumlah kendaraan roda 4		Pick Up	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Laporan Penyedia Jasa Administrasi P3K Paruh Waktu dan Non ASN Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan</i>	laporan	<i>Penyediaan Jasa Administrasi P3K Paruh Waktu dan Non ASN Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan</i>	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	Persen	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah pemeliharaan CCTV</i>		<i>B. Pemeliharaan (CCTV)</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan AC</i>		<i>B. Pemeliharaan (AC 2 PK. 1PK. 5 PK) kantor Disparbud&kemuning</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan Laptop dan Komputer</i>		<i>B. Pemeliharaan Laptop dan Komputer</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan Printer</i>		<i>B. Pemeliharaan Printer</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan Genset</i>		<i>B. Pemeliharaan Genset</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan soundsystem</i>		<i>B. Pemeliharaan Soundsytem</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan Kamera</i>		<i>B. Pemeliharaan Kamera</i>	
					<i>Jumlah pemeliharaan Sofa</i>		<i>B. Pemeliharaan Sofa</i>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah pajak Kendaraan Roda 2 & 4</i>		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 & 4	
					<i>Jumlah pemeliharaan Eselon II</i>		B. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Penumpang Eselon II	
					<i>Jumlah pemeliharaan Dinas Operasional</i>		B. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah honorarium Barang/Jasa		B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
					Jumlah Konsultansi Perencanaan Desain Interior Kemuning Gading		B. Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Interior Kemuning Gading	
					Jumlah Konsultansi Perencanaan Arsitektur Gedung Disparbud		B. Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Gedung Disparbud	
					Jumlah Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Disparbud		B. Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Disparbud	
					Jumlah Jasa Konsultansi Pengawasan Museum Pajajaran		B. Jasa Konsultansi Pengawasan Museum Pajajaran	
					Jumlah Revitalasi Gedung Kemuning Gading		Revitalasi Gedung Kemuning Gading	
					Jumlah pemeliharaan Gedung Disparbud		B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Disparbud	
					Jumlah Jasa Konsultansi Pengawasan Kemuning Gading		B. Jasa Konsultansi Pengawasan Kemuning Gading	
					Jumlah pemeliharaan Gedung Kemuning		B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kemuning	
					Jumlah pemeliharaan Gedung Museum		B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum	
					Jumlah sarana prasarana Gedung Kemuning Gading		Pengadaan sarana prasarana Gedung Kemuning Gading	
Sasaran RPJMD: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Tujuan : Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat	Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan		IK Sasaran RPJMD: Opini BPK	Predikat		
					IK Sasaran RPJMD: SAKIP Tingkat Kota	Predikat		
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		
					Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/ITDA	persen		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
					Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	persen		
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	persen	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	persen		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah dokumen Renja Disparbud	dokumen	Penyusunan dokumen Renja Disparbud	
					Jumlah dokumen Renja Perubahan Disparbud	dokumen	Penyusunan dokumen Renja Perubahan Disparbud	
					Jumlah dokumen Manajemen Risiko Disparbud	dokumen	Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Disparbud	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah laporan LKIP	Laporan	Penyusunan laporan LKIP	
					Jumlah laporan LKPJ	Laporan	Penyusunan laporan LKPJ	
					Jumlah laporan LPPD	Laporan	Penyusunan laporan LPPD	
					Jumlah laporan ISO	Laporan	Penyusunan ISO	
				Terlaksananya pengadministrasian keuangan perangkat daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	persen	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	persen		
				Terlaksananya pengelolaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah ASN/ PPPK penerima gaji dan tunjangan	Orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/ PPPK	
				Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					Jumlah laporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan & capaian kinerja keuangan	
					Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tujuan : Terwujudnya sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat				Laju PDRB Sektor Jasa Akomodasi dan Makan Minum (ADHB)			
					Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (ADHB)			
					Persentase kontribusi sektor Ekonomi kreatif terhadap PDRB (ADHB)			
		Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif			Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata terhadap Total PAD			
					Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun			
					Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif			
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	Persen	Program : Pemasaran Pariwisata	
					Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Kegiatan : Jumlah promosi kepariwisataan	
					Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Pengembangan Peta Digital Kepariwisata (PERKAWIS) Kota Bogor</i>	Kali	<i>Pemeliharaan Peta Digital Kepariwisata (PERKAWIS) Kota Bogor</i>	
					<i>Jumlah Calendar Of Event</i>	Kali	<i>Calendar Of Event + (Kerjasama)</i>	
					<i>Jumlah Pemeliharaan Layanan Kepariwisata (LAKSA)</i>	Kali	<i>Pemeliharaan Layanan Kepariwisata (LAKSA)</i>	
					Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Laporan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri</i>	Laporan	<i>Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Pasanggi Mojang Jajaka</i>	Orang	<i>Pasanggi Mojang Jajaka</i>	
					<i>Jumlah Pameran di dalam dan di luar negeri</i>	kali	<i>Pameran di dalam dan di luar negeri</i>	
					<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM Mojang Jajaka</i>	orang	<i>Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM Mojang Jajaka</i>	
					<i>Penugasan Mojang Jajaka</i>	Orang	<i>MOKA Pendamping</i>	
					<i>Jumlah event yang dilaksanakan</i>	event	<i>event-event promosi kepariwisataan</i>	
				Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>1. Pembuatan video promosi kepariwisataan</i>	Video	<i>1. Pembuatan video promosi kepariwisataan</i>	
					<i>2. Jumlah Promosi di TV, Radio dan Media Sosial</i>	kali	<i>2. Promosi Media (TV, Videotron, Radio dan Media Sosial)</i>	
					<i>3. Jumlah Promosi di Alat Transportasi</i>	kali	<i>3. Promosi di Alat Transportasi</i>	
					<i>4. Jumlah Cetak Promosi</i>	buah	<i>4. Belanja Cetak Promosi</i>	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Orang	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
					Lama Tinggal Wisatawan	Hari		
					Tingkat Hunian Kamar Hotel	Persen		
				Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	lokasi	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata</i>	orang	<i>Pelatihan Pengelolaan Daya Tarik Wisata</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan K3 Daya Tarik Wisata</i>	orang	<i>Pelatihan K3 Daya Tarik Wisata</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Hospitality Daya Tarik Wisata</i>	orang	<i>Pelatihan Hospitality Daya Tarik Wisata</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan	lokasi	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Pokdarwis yang Mendapatkan Hibah</i>	Lokasi	Hibah Pokdarwis	
					<i>Jumlah Kampung Wisata yang Terfasilitasi</i>	Lokasi	Pengadaan Sarana prasarana di Kampung Wisata	
					<i>Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan</i>	Lokasi	Pendampingan Daya Tarik Wisata	
					<i>Jumlah Lokasi Jambore Daya Tarik Wisata</i>	Lokasi	Jambore Daya Tarik Wisata	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Laporan	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata</i>	Laporan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisataa	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	laporan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi</i>	Lokasi	Pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan penunjang pariwisata di Daya Tarik Wisata	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi		Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaku	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Terlaksananya Anugrah Pariwisata Kota Bogor</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>Anugrah Pariwisata Kota Bogor</i>	
					<i>Terlaksananya Rakor Teknis Kepariwisataaan</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>Rakor Teknis Kepariwisataaan</i>	
					<i>Terlaksananya Pembinaan Pemenuhan Perijinan Usaha Pariwisata</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>Pembinaan Pemenuhan Perijinan Usaha Pariwisata</i>	
			Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	Persen	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Pelaku		
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Orang	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang		
				Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Workshop</i>	<i>Orang</i>	<i>Workshop Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi</i>	<i>Orang</i>	<i>Sertifikasi Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah Event Ekonomi Kreatif yang Diselenggarakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Festival Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Unjuk Kreasi</i>	<i>Orang</i>	<i>Insidentil Penampilan Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah Film yang tersedia</i>	<i>film</i>	<i>Pembuatan Film</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Workshop</i>	Orang	<i>Workshop Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Perlombaan</i>	Orang	<i>Perlombaan Ekonomi Kreatif</i>	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	Laporan	<i>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif</i>	Laporan	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif</i>	
				Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI</i>	Orang	<i>Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	
				Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pelatihan Sadar Wisata</i>	Orang	<i>Pelatihan Sadar Wisata</i>	
					<i>Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Pembinaan Pariwisata Ramah Muslim</i>	Orang	<i>Pembinaan Pariwisata Ramah Muslim</i>	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang tersertifikasi kompetensi</i>	Orang	<i>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif</i>	Orang	<i>Pelatihan subsektor kreatif</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Inkubasi Usaha Ekonomi Kreatif</i>	Orang	<i>Inkubasi usaha ekonomi kreatif</i>	
				Terlaksananya Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Sub Kegiatan : Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan</i>	Orang	<i>Pelatihan Pemanfaatan Smartphone untuk Foto Produk dan Pemasaran</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan</i>	Orang	<i>Pelatihan Penggunaan E-Commerce dan Digital Marketing</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan</i>	Orang	<i>Pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital</i>	
				Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Profesi</i>	Orang	<i>Pelatihan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Profesi</i>	Orang	<i>Sertifikasi Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif		persentase produk ekonomi kreatif binaan yang mendapat sertifikasi HKI	Persen	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	
				Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kegiatan	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	Sub Kegiatan : Pengembangan Pendidikan	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Sosialisasi Ekonomi Kreatif yang Diselenggarakan</i>	Kegiatan	Sosialisasi ekonomi kreatif	
					<i>Jumlah Modul Pembelajaran Ekonomi Kreatif</i>	Dokumen	Pengembangan modul pembelajaran ekonomi kreatif	
				Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kebijakan	Sub Kegiatan : Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Naskah Akademik Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang tersusun</i>	Dokumen	Penyusunan Naskah Akademi Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					<i>Dokumen Draft Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	Dokumen	Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	
					Rincian Output :		Rincian Aktivitas :	
					<i>Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Kekayaan Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Produk	Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sesuai Renstra Awal dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Program: Pengembangan Kebudayaan	jumlah event seni budaya di Kota Bogor	54	58	1.514.986.800	61	3.009.427.000	65	3.009.427.000	70	3.317.213.200	74	3.117.213.200	
	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	310.006.800	1	318.423.000	1	168.423.000	1	426.209.200	1	176.209.200	
	Sub Kegiatan : Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		1	310.006.800	1	318.423.000	1	168.423.000	1	426.209.200	1	176.209.200	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (POKIR)	Jumlah barang yang diserahkan untuk kegiatan POKIR		9		10		10		10		10		
	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (Musrenbang)	Jumlah barang yang diserahkan untuk keg. Musrenbang		7		7		7		8		8		
	Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bogor	Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota		1										
	Pemutakhiran Data PPKD Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data				1								
	Penyusunan Kajian dan Data Base Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Kajian dan Data Base Warisan Budaya Tak Benda		1										
	Penyusunan Data Pemetaan Rute Destinasi Wisata Budaya	Jumlah Data Pemetaan Rute Destinasi Wisata Budaya				1								
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kebudayaan	Jumlah Rancangan Rencana Induk Kebudayaan								1				
	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan	1	7	1.204.980.000	12	2.691.004.000	12	2.841.004.000	12	2.891.004.000	12	2.941.004.000	
	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		1	954.980.000	1	2.691.004.000	1	2.841.004.000	1	2.891.004.000	1	2.941.004.000	

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Cap Go Meh	Terlaksananya Kegiatan Cap Go Meh				1		1		1		1		
	HJB (Hari Jadi Bogor)	Terlaksananya Kegiatan Helaran HJB		2		2		2		2		2		
	Insidentil (paket kecil)	Terlaksananya pagelaran kesenian kegiatan Insidentil		20		38		40		40		40		
	Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)	Terlaksananya Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)				1		1		1		1		
	Sidekah Bumi	Terlaksananya kegiatan Sidekah Bumi		1		1		1		1		1		
	Festival Marawis	Terlaksananya Festival Marawis				1		1		1		1		
	Gebyar Seni Budaya (Pasanggiri Degung, Angklung, Pupuh)	Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Budaya				1		1		1		1		
	APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI		1		1		1		1		1		
	JKPI	Terlaksananya kegiatan JKPI		1		1		1		1		1		
	WJF	Terlaksananya kegiatan WJF		1		1		1		1		1		
	Pagelaran Wayang Golek dalam rangka HJB	Terlaksananya Pagelaran Wayang Golek				1		1		1		1		
	Festival Kemasan Seni Pertunjukan Kota Bogor	Terlaksananya Festival Kemasan Seni Pertunjukan Kota Bogor		1		1		1		1		1		
	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		4	250.000.000									
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penjaringan dan Pemberian Penghargaan kepada Maestro, Penggiat, Pelestari dan Pelaku Seni Budaya Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Maestro, Penggiat, Pelestari dan Pelaku Seni Budaya Berprestasi												
2	Program : Pengembangan Kesenian Tradisonal	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	48.8%	60	61.000.000	66.6	400.000.000	73.8	300.000.000	77.7	300.000.000	84.4	300.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Jumlah lembaga seni tradisional yang dibina	10 Lembaga	10	61.000.000	10	400.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	
	Sub Kegiatan : Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	sertifikat	15	61.000.000	25	300.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Diklat Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah peserta Diklat Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya				50		50		50		50		
	Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah peserta Sertifikasi Pelaku Seni dan Budaya		15		25		25		25		25		
	Penyusunan Profil Data Base Lembaga dan Komunitas Seni Budaya	Jumlah Profil Data Base Lembaga dan Komunitas Seni Budaya				1								
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas tatakelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga seni tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga			10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Workshop Managemen Tata Kelola Lembaga Seni	Jumlah peserta workshop manajemen tata kelola lembaga seni				50		50		50		50		
3	Program : Pembinaan Sejarah	Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	12,60%	15,8	40.000.000	17.8	40.000.000	19.8	497.000.000	21.8	140.000.000	23.8	147.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		1	40.000.000	1	40.000.000	1	497.000.000	1	140.000.000	1	147.000.000	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		40	40.000.000	45	40.000.000	50	47.000.000	55	140.000.000	60	147.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Workshop Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor	Jumlah peserta workshop pelaku pelestarian sejarah kota bogor		40		45						50		
	Bimtek Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor	Jumlah peserta Bimtek Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor						50		45				
	Sertifikasi Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor (Museum)	Jumlah peserta Sertifikasi Pelaku Pelestarian Sejarah Kota Bogor								10		10		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah							200.000.000		-			
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pencetakan Papan Informasi & Peta Kota Pusaka	Jumlah papan informasi & peta kota pusaka												
	Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat						1	250.000.000					
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pencetakan Buku Sejarah Bogor	Jumlah buku sejarah bogor						10000						

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	7%	8.2	861.000.000	10.8	846.000.000	12.37	758.000.000	14.48	770.000.000	16.49	782.000.000	
	Kegiatan : Penetapan cagar budaya peringkat kab / kota	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	34 Objek	3	102.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	
	Sub Kegiatan : Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	34 CObjek	3	102.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Menetapkan ODCB menjadi CB	jumlah objek cagar budaya yang tetapkan		3		10		10		10		10		
	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat kab / kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	32 Objek	32	759.000.000	33	496.000.000	34	408.000.000	32	420.000.000	32	432.000.000	
	Sub Kegiatan : Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	32 Objek	32	759.000.000	33	496.000.000	34	408.000.000	32	420.000.000	32	432.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Jasa juru pelihara cagar budaya	terlindungi objek diduga cagar budaya		32		33		34		35		36		
	Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Cagar Budaya	Jumlah Peraturan Wali Kota tentang cagar budaya		1										
	Kajian Penyusunan Narasi Ilmiah (Naskah Kuno, Prasasti, Artefak dan Peninggalan Sejarah lain) untuk Koleksi museum	Jumlah Narasi ilmiah tentang sejarah di Kota Bogor		1										
	Pemutakhiran Data Cagar Budaya dan ODCB Kota Bogor	Jumlah pemutakhiran data Cagar Budaya dan ODCB terupdate		1										
	Penyusunan Narasi 6 Deleniasi/ Wilayah Kota Pusaka	Jumlah narasi 6 Deleniasi/ Wilayah Kota Pusaka												
5	Program : Pengelolaan Permuseuman	jumlah kunjungan ke museum	217.858 orang	240.187	-	252.196	5.165.000.000	264.805	400.000.000	278.045	325.000.000	291.585	325.000.000	
	Kegiatan : Pengelolaan Museum Kab / Kota	jumlah kunjungan ke museum	217.858 orang	240.187	-	252.196	5.165.000.000	264.805	400.000.000	278.045	325.000.000	291.585	325.000.000	
	Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 unit		-	1	5.165.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyusunan DED Desain Interior Museum Pajajaran	Jumlah dokumen DED Desain Interior Museum Pajajaran	0 Dokumen											
	DED Pembangunan Museum Pajajaran	Jumlah dokumen DED Pembangunan Museum Pajajaran	Dokumen											
	Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	Jumlah Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	Paket			1								

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	Paket			1								
	Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	Jumlah Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi Pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor Lanjutan	Paket			1								
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	Jumlah Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior Museum Pajajaran Kota Bogor	Paket			1								
	Jasa Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bogor	Jumlah Jasa Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bogor				1								
	Penyusunan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pembentukan UPTD Museum, Gedung Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD Museum, Gedung Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif				1								
	Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	unit	-	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pengadaan Penambahan Koleksi Museum	Jumlah unit koleksi museum	unit					4		4		4		
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	-	-	-	-	-	10	50.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Seritikasi, Diklat dan Bimtek Pengelola Museum	Jumlah peserta Seritikasi, Diklat dan Bimtek Pengelola Museum						10		5		5		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Koleksi Museum	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	-	-	-	-	-	50	150.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pemeliharaan Koleksi Museum	Jumlah pemeliharaan Koleksi Museum						50		50		50		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional Museum	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	-	-	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Operasional dan Promosi Kegiatan Museum	Jumlah Operasional dan Promosi Kegiatan Museum						4		4		4		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.70	88,00	20.901.399.312	88,25	22.304.729.346	88,50	16.507.421.456	88,75	17.648.176.377	89,00	18.936.208.090	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	100	100		100		100		100		100		
		Nilai Hasil Survey Kepuasan	93.38	93.40		93.41		93.42		93.43		93.44		
		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	1	1		1		1		1		1		
	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100	1.500.000	100	76.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	
		Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100%	100		100		100		100		100		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyusunan dokumen Renja Disparbud	Jumlah dokumen Renja Disparbud	1 Dokumen	1										
	Penyusunan dokumen Renja Perubahan Disparbud	Jumlah dokumen Renja Perubahan Disparbud	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
	Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Disparbud	Jumlah dokumen Manajemen Risiko Disparbud	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	1.000.000	4	76.000.000	4	61.000.000	4	61.000.000	4	61.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	penyusunan laporan LKIP	Jumlah laporan LKIP	1 Laporan	1		1		1		1		1		
	Penyusunan laporan LKPJ	Jumlah laporan LKPJ	1 Laporan	1		1		1		1		1		
	penyusunan laporan LPPD	Jumlah laporan LPPD	1 Laporan	1		1		1		1		1		
	penyusunan ISO	Jumlah laporan ISO	1 Laporan			1		1		1		1		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	97,47%	97,49%	8.216.710.524	97,50%	10.703.233.706	97,51%	11.767.731.816	97,52%	12.938.679.737	97,53%	14.226.722.450	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	35	8.158.457.924	35	10.644.981.106	35	11.709.479.216	35	12.880.427.137	35	14.168.469.850	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/ PPPK	Jumlah ASN/ PPPK penerima gaji dan tunjangan	36 Orang	35		35		35		35		35		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 laporan	12	58.252.600	12	58.252.600	12	58.252.600	12	58.252.600	12	58.252.600	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Koordinasi dan penyusunan laporan & capaian kinerja keuangan	Jumlah laporan dan Capaian Kinerja Keuangan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan	1		1		1		1		1		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	100	870.078.000	100	906.289.700	100	908.289.700	100	908.289.700	100	908.289.700	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	165.494.400	1	381.025.900	1	381.025.900	1	381.025.900	1	381.025.900	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Perabot Kantor, Alat Listrik, karangan bunga, isi ulang air minum	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Perabot Kantor, Alat Listrik, karangan bunga, isi ulang air minum												
	B. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang													
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	21.985.600	1	25.497.800	1	27.497.800	1	27.497.800	1	27.497.800	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Dus Arsip, Map Dinas)	Jumlah fotocopy, dus arsip dan map dinas												
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	20.016.000	1	20.016.000	1	20.016.000	1	20.016.000	1	20.016.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	jumlah surat kabar/ majalah												
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	662.582.000	1	479.750.000	1	479.750.000	1	479.750.000	1	479.750.000	

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyediaan makan dan minum rapat dan kegiatan	Jumlah paket makan dan minum rapat dan kegiatan		1		1		1		1		1		
	Penyediaan Biaya perjalanan dinas luar daerah	Jumlah paket perjalanan dinas luar daerah		1		1		1		1		1		
	Penyediaan Biaya perjalanan dinas luar negeri	Jumlah paket perjalanan dinas luar negeri		1		1		1		1		1		
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100	100	436.800.600	100	1.677.915.600	100	693.761.600	100	663.568.600	100	663.557.600	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20	436.800.600	30	693.761.600	30	693.761.600	25	663.568.600	25	663.557.600	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Belanja Modal Mebel	Jumlah mebel												
	Belanja Modal Alat Pendingin	jumlah alat pendingin												
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	jumlah meja rapat												
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	jumlah lemari dan arsip												
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer)	jumlah personal computer												
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-	1	626.154.000		-		-		-	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Dan III	jumlah kendaraan roda 4				1								
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	1	358.000.000		-		-		-	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pick Up	jumlah kendaraan roda 4												
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	1.008.549.421	100	1.623.219.573	100	1.623.219.573	100	1.623.219.573	100	1.623.219.573	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	275.699.613	1	415.699.613	1	415.699.613	1	415.699.613	1	415.699.613	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1		1		1		1		1		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	732.849.808	1	1.207.519.960	1	1.207.519.960	1	1.207.519.960	1	1.207.519.960	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyediaan Jasa Administrasi P3K Paruh Waktu dan Non ASN Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Administrasi P3K Paruh Waktu dan Non ASN Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	1 laporan	1		1		1		1		1		
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100%	100	10.367.760.767	100	7.317.570.767	100	1.452.918.767	100	1.452.918.767	100	1.452.918.767	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	77	348.652.665	77	380.652.665	77	380.652.665	77	380.652.665	77	380.652.665	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	B. Pemeliharaan (CCTV)	Jumlah pemeliharaan CCTV	2 paket	2		2		2		2		2		
	B. Pemeliharaan (AC 2 PK. 1PK. 5 PK) kantor Disparbud&kemuning	Jumlah pemeliharaan AC	24 unit	24		24		24		24		24		
	B. Pemeliharaan Laptop dan Komputer	Jumlah pemeliharaan Laptop dan Komputer	29 unit	29		29		29		29		29		
	B. Pemeliharaan Printer	Jumlah pemeliharaan Printer	20 unit	20		20		20		20		20		
	B. Pemeliharaan Genset	Jumlah pemeliharaan Genset												
	B. Pemeliharaan Soundsytem	Jumlah pemeliharaan soundsystem	1 paket											
	B. Pemeliharaan Kamera	Jumlah pemeliharaan Kamera	2 unit	2		2		2		2		2		
	B. Pemeliharaan Sofa	Jumlah pemeliharaan Sofa	5 set											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	15	219.214.102	15	296.004.102	15	296.004.102	15	296.004.102	15	296.004.102	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 & 4													
	B. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Penumpang Eselon II													
	B. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional													

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3	9.799.894.000	3	6.640.914.000	3	776.262.000	3	776.262.000	3	776.262.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	B. Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah honorarium Barang/ Jasa												
	B. Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Interior Kemuning Gading	Jumlah jasa Kemuning Gading												
	B. Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitekt Gedung Disparbud	Jumlah jasa Gedung Disparbud												
	B. Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Disparbud)	Jumlah jasa Gedung Disparbud												
	B. Jasa Konsultansi Pengawasan Museum Pajajaran)	Jumlah jasa Museum Pajajaran												
	Revitalasi Gedung Kemuning Gading dan Interiror	Jumlah gedung Gading dan Interiror		1		1		1		1		1		
	B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Disparbud	Jumlah pemeliharaan Gedung Disparbud	1											
	B. Jasa Konsultansi Pengawasan Kemuning Gading	Jumlah jasa Kemuning Gading												
	B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kemuning	Jumlah pemeliharaan Gedung Kemuning		1		1		1		1		1		
	B. Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum	Jumlah pemeliharaan Gedung Museum	1	1		1		1		1		1		
	Pengadaan sarana prasarana Gedung Kemuning Gading	Jumlah sarana Kemuning Gading												
7	Program : Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	9.09%	10	961.284.200	10	11.000.000.000	10	11.175.000.000	10	12.500.000.000	10	11.250.000.000	
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi kepariwisataan	Kegiatan	3	961.284.200	3	11.000.000.000	3	11.175.000.000	3	12.500.000.000	3	11.250.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	250.000.000	3	550.000.000	3	550.000.000	3	550.000.000	3	550.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pemeliharaan Peta Digital Kepariwisataaan (PERKAWIS) Kota Bogor	Jumlah Pengembangan Peta Digital Kepariwisataaan (PERKAWIS) Kota Bogor		1		1		1		1		1		
	Calendar Of Event + (Kerjasama)	Jumlah Calendar Of Event		1		1		1		1		1		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemeliharaan Layanan Kepariwisataan (LAKSA)	Jumlah Pemeliharaan Layanan Kepariwisataan (LAKSA)		1		1		1		1		1		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	3	541.284.200	3	4.350.000.000	3	4.500.000.000	3	5.800.000.000	3	4.500.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pasanggiri Mojang Jajaka	Pasanggiri Mojang Jajaka				30				30		1		
	Pameran di dalam dan di luar negeri	Jumlah Pameran di dalam dan di luar negeri		2		5		5		5		5		
	Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM Mojang Jajaka	Jumlah Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM MOKA						3						
	MOKA Pendamping	Penugasan Mojang Jajaka		150										
	event-event promosi kepariwisataan	Jumlah event yang dilaksanakan		1		3		4		5		5		
	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi	4	170.000.000	4	6.100.000.000	4	6.125.000.000	4	6.150.000.000	4	6.200.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pembuatan video promosi kepariwisataan	Pembuatan video promosi kepariwisataan		1		1		1		1		1		
	Promosi Media (TV, Videotron, Radio dan Media Sosial)	Jumlah Promosi di TV, Radio dan Media Sosial		10		1		1		1		1		
	Promosi di Alat Transportasi	Jumlah Promosi di Alat Transportasi		1		60		60		60		60		
	Belanja Cetak Promosi	Jumlah Cetak Promosi		25		1		1		1		1		
8	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	8.093.203	9.457.751	475.000.000	10.167.152	1.900.000.000	10.876.956	2.150.000.000	11.587.162	2.225.000.000	12.297.771	2.275.000.000	
		Lama Tinggal Wisatawan	2 Hari	2		2		2		2				
		Tingkat Hunian Kamar Hotel	70.48 %	70.49		70.50		70.51		70.52		70.53		
	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	lokasi		-	1	450.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	N/A	-	90	450.000.000	150	600.000.000	150	600.000.000	150	600.000.000	

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata	N/A	N/A		30		50		50		50		
	Pelatihan K3 Daya Tarik Wisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan K3 Daya Tarik Wisata	N/A	N/A		30		50		50		50		
	Pelatihan Hospitality Daya Tarik Wisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Hospitality Daya Tarik Wisata	N/A	N/A		30		50		50		50		
	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan	lokasi	3	475.000.000	3	1.050.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	475.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Hibah Pokdarwis	Jumlah Pokdarwis yang mendapatkan Hibah	N/A											
	Pengadaan Sarana prasarana di Kampung Wisata	Jumlah Kampung Wisata yang Terfasilitasi	N/A	1		1		1		1		1		
	Pendampingan Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	N/A	1		1		2		2		2		
	Jambore Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Jambore Daya Tarik Wisata	N/A	1		1		6		6		6		
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Laporan	2	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisataa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Laporan	1		1		1		1		1		
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan		-									
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	2		2		2		2		2		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sub Kegiatan : Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara		1	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan penunjang pariwisata di Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi	lokasi	1		1		1		1		1		
	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	usaha		-		400.000.000		450.000.000		525.000.000		575.000.000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	N/A Pelaku		-	100	400.000.000	100	450.000.000	100	525.000.000	100	575.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Anugrah Pariwisata Kota Bogor	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi	pelaku usaha			50		50		50		50		
	Rakor Teknis Kepariwisataan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi	pelaku usaha			50		50		50		50		
	Pembinaan Pemenuhan Perijinan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi	pelaku usaha							50		50		
9	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0.86%	0.91	848.793.030	0.93	2.570.000.000	0.95	2.770.000.000	0.96	2.970.000.000	0.97	3.170.000.000	
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	75 Pelaku	95		105		115		125		135		
	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Orang	150	718.743.030	160	1.880.000.000	160	2.080.000.000	160	2.280.000.000	160	2.480.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	60		60		60		60		60		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	2	257.180.000	2	1.030.000.000	2	1.230.000.000	2	1.380.000.000	2	1.580.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Workshop Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Workshop	Orang	30		30		30		30		30		
	Sertifikasi Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Orang											

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Festival Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Ekonomi Kreatif yang Diselenggarakan	Kegiatan	3		3		3		3		3		
	Insidentil Penampilan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Unjuk Kreasi	Orang	5		5		5		5		5		
	Pembuatan Film	Jumlah Film yang tersedia	Film	1		3		3		3		3		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	-	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Workshop Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Workshop	Orang	30		30		30		30		30		
	Perlombaan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Perlombaan	Sub Sektor			3		3		3		3		
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Laporan	4		4		4		4		4		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	70 Orang	50	111.563.030	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI	Orang	50		60		60		60		60		
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	N/A Orang	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan Sadar Wisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pelatihan Sadar Wisata	Orang	100		100		100		100		100		
	Pembinaan Pariwisata Ramah Muslim	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Pembinaan Paiwisata Ramah Muslim	Orang	100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	181 Orang	90	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (2025: house keeping, FO)	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang tersertifikasi kompetensi	Orang	90		100		100		100		100		
	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	75 Orang	70	130.050.000	100	690.000.000	100	690.000.000	100	690.000.000	100	690.000.000	
	Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75 Orang	40	-	40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan subsektor kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif		30		30		30		30		30		
	Inkubasi usaha ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Inkubasi Usaha Ekonomi Kreatif		10		10		10		10		10		
	Sub Kegiatan : Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	1	85.600.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan Pemanfaatan Smartphone untuk Foto Produk dan Pemasaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	30		30		30		30		30		
	Pelatihan Penggunaan E-Commerce dan Digital Marketing	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	30		30		30		30		30		
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang			30		30		30		30		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	N/A Orang	30	44.450.000	60	190.000.000	60	190.000.000	60	190.000.000	60	190.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Pelatihan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Profesi	Orang	N/A		30		30		30		30		
	Sertifikasi Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Profesi	Orang	30		30		30		30		30		

No	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	persentase produk ekraf binaan yang mendapat sertifikasi HKI	%	10.2	200.000.000	11.2	150.000.000	12.2	155.000.000	13.2	160.000.000	14.2	165.000.000	
	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	2	200.000.000	2	150.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	165.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	N/A Dokumen	N/A	-	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Sosialisasi ekonomi kreatif	Jumlah Sosialisasi Ekonomi Kreatif yang Diselenggarakan	Kegiatan	N/A		3		3		3		3		
	Pengembangan modul pembelajaran ekonomi kreatif	Jumlah Modul Pembelajaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	N/A		3		3		3		3		
	Sub Kegiatan : Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kretaif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	N/A Kebijakan	1	150.000.000		-		-		-		-	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Penyusunan Naskah Akademi Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Naskah Akademik Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang tersusun	Dokumen	1		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen Draft Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A Produk	50	50.000.000	55	55.000.000	60	60.000.000	65	65.000.000	70	70.000.000	
	Rincian Aktivitas :	Rincian Output :												
	Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Kekayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	produk	50		55		60		65		70		
	JUMLAH TOTAL				25.863.463.342		47.385.156.346		37.721.848.456		40.355.389.577		40.467.421.290	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
PRIORITAS KEPALA DAERAH						
BOGOR SEJAHTERA						
Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	Outcome Program: Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	
				Lama Tinggal Wisatawan	hari	
				Tingkat Hunian Kamar Hotel	persen	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	lokasi	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	orang	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan	lokasi	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	laporan	
		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	laporan	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	usaha	
		Terlaksananya Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	pelaku	

Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Outcome Program: Meningkatnya Pemasaran Pariwisata		Program: Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	persen	
		Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi kepariwisataan	kegiatan	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	
	Outcome Program: Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Program: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	persen	
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	pelaku	
		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	orang	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	
		Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	

Program Prioritas	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	
Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	Outcome Program: Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Program: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	persen	
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	pelaku	
		Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	orang	
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	
		Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Sub Kegiatan : Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	laporan	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	orang	
	Outcome Program: Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif		Program: Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	persentase produk ekraf binaan yang mendapat sertifikasi HKI	persen	
		Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	kegiatan	
		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 4.4
Rencana Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas	Penjelasan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Sub Kegiatan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	
1	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosika n seni budaya lokal	Pelatihan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	30	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
		Pelatihan K3 Daya Tarik Wisata	30	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	
		Pelatihan Hospitality Daya Tarik Wisata	30	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	
		Pengadaan Sarana prasarana di Kampung Wisata	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Kegiatan: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pendampingan Daya Tarik Wisata	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
		Jambore Daya Tarik Wisata	1	275.000.000	1	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan penunjang pariwisata di Daya Tarik Wisata	-		1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Sub Kegiatan: Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
		Anugrah Pariwisata Kota Bogor	-		50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
		Rakor Teknis Kepariwisataan	-		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
		Pemeliharaan Peta Digital Kepariwisataan (PERKAWIS) Kota Bogor	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
		Calendar Of Event + (Kerjasama)	1	150.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
		Pemeliharaan Layanan Kepariwisataan (LAKSA)	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
		Pasanggiri Mojang Jajaka		-	30	750.000.000		-	30	800.000.000		-	Sub Kegiatan: Fasilitasi

No	Prioritas	Penjelasan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Sub Kegiatan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	
		Pameran di dalam dan di luar negeri	2	388.678.700	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM Mojang Jajaka	-	-	0	-	3	300.000.000	0	-	0	300.000.000	
		MOKA Pendamping	150	62.649.000									
		event-event promosi kepariwisataan	1	89.956.500	3	1.600.000.000	4	2.200.000.000	5	3.000.000.000	5	2.200.000.000	
		Pembuatan video promosi kepariwisataan	1	80.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	Sub Kegiatan: Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Promosi Media (TV, Videotron, Radio dan Media Sosial)	10	15.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
		Promosi di Alat Transportasi	1	50.000.000	60	2.500.000.000	60	2.500.000.000	60	2.500.000.000	60	2.500.000.000	
		Belanja Cetak Promosi	25	25.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	
		Workshop Ekonomi Kreatif	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	Sub Kegiatan: Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		Sertifikasi Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
		Festival Ekonomi Kreatif	3	207.180.000	3	650.000.000	3	850.000.000	3	1.000.000.000	3	1.200.000.000	
		Insidentil Penampilan Ekonomi Kreatif	5		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
		Workshop Ekonomi Kreatif			30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	50	111.563.030	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
		Pelatihan Sadar Wisata	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Sub Kegiatan: Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

No	Prioritas	Penjelasan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Sub Kegiatan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	90	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Sub Kegiatan: Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
2	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	Pelatihan subsektor kreatif			30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	Sub Kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Inkubasi usaha ekonomi kreatif	1		10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	
		Pelatihan Pemanfaatan Smartphone untuk Foto Produk dan Pemasaran	30	85.600.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	Sub Kegiatan: Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
		Pelatihan Penggunaan E-Commerce dan Digital Marketing	30		30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital	-	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
		Pelatihan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif		-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	Sub Kegiatan: Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
		Sertifikasi Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif	30	44.450.000	30	140.000.000	30	140.000.000	30	140.000.000	30	140.000.000	
		Sosialisasi ekonomi kreatif			3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	Sub Kegiatan: Pengembangan Pendidikan
		Pengembangan modul pembelajaran ekonomi kreatif			3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	
		Penyusunan Naskah Akademi Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1		1								Sub Kegiatan: Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kretaif Daerah
		Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1				1						
		Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	50	50.000.000	55	55.000.000	60	60.000.000	65	65.000.000	70	70.000.000	Sub Kegiatan: Fasilitas Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Asta Cita

No.	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	
						Lama Tinggal Wisatawan	
						Tingkat Hunian Kamar Hotel	
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	
				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	
					Rincian Aktivitas :		
					Pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan penunjang pariwisata di Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi	
			Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	persentase produk ekonomi kreatif binaan yang mendapat sertifikasi HKI	
				Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	
					Rincian Aktivitas :		
					Sosialisasi ekonomi kreatif	Jumlah Sosialisasi Ekonomi Kreatif yang Diselenggarakan	
					Pengembangan modul pembelajaran ekonomi kreatif	Jumlah Modul Pembelajaran Ekonomi Kreatif	

No.	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Rincian Aktivitas :		
					Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Kekayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event seni budaya di Kota Bogor	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Sub Kegiatan : Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
					Rincian Aktivitas :		
					Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (POKIR)	terlaksananya belanja barang untuk kegiatan POKIR	
					Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Musrenbang)	terlaksananya belanja barang untuk keg. Musrenbang	
			Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	
				Terlaksananya Penetapan cagar budaya peringkat kab/ kota	Kegiatan : Penetapan cagar budaya peringkat kab / kota	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Sub Kegiatan : Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	
					Rincian Aktivitas :		
					Menetapkan ODCB menjadi CB	jumlah objek cagar budaya yang tetapkan	

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

4.3 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang dapat dilihat langsung untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Utama Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH									
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	7,01	7,63	8,25	8,87	9,48	10,1	10,72
2	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen	8	12	16	20	24	28	32
3	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Predikat	A (87,70)	A (87,75)	A (88,00)	A (88,25)	A (88,50)	A (88,75)	A (89,00)
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	95	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,74	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	3,8
6	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/ Tahun/ PD	1	1	1	1	1	1	1
7	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	Persen	24,75	20,56	18,79	19,05	19,22	19,38	19,54
8	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	Persen	43,23	8,10	8,10	8,11	8,11	8,12	8,12
9	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	Persen	N/A	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
KEBUDAYAAN									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	7,01	7,63	8,25	8,87	9,48	10,1	10,72
URUSAN PILIHAN									
PARIWISATA									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	NA	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	NA	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
3	Tingkat hunian akomodasi	persen	70,47	70,48	70,49	70,50	70,51	70,52	70,53
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	6,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	24,75	20,56	18,79	19,05	19,22	19,38	19,54

Sumber: Disparbud Kota Bogor, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Disparbud Kota Bogor tahun 2025-2029 merupakan dasar pedoman yang digunakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bogor, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, maka perencanaan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Disparbud setiap tahunnya. Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Disparbud Kota Bogor tahun 2025-2029 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Disparbud Kota Bogor sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Disparbud Kota Bogor.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Disparbud Kota berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2025-2029.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Disparbud berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Disparbud harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor dan Renstra Disparbud beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2025-2029, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Disparbud, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Demikian dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor maupun bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya

WALI KOTA,

TTD

DEDIE A. RACHIM